



**BUKU #1**

# *Masterplan Probolinggo Smartcity*



**ANALISIS STRATEGI  
SMART CITY KOTA PROBOLINGGO**

2018  
DISKOMINFO KOTA PROBOLINGGO

## DAFTAR ISI

### BAB I

ANALISIS MASA DEPAN .....	1
1.1 Perkembangan Kota Probolinggo .....	1
1.1.1 Letak Geografis .....	1
1.1.2 Demografis .....	3
1.1.3 Pertanian .....	5
1.1.4 Perkebunan .....	6
1.1.5 Peternakan .....	6
1.1.6 Perikanan .....	7
1.1.7 Industri dan Perdagangan .....	8
1.1.8 Pariwisata .....	10
1.1.9 PDRB.....	11
1.2 Analisis Masa Depan .....	16

### BAB II

ANALISIS KESIAPAN DAERAH .....	23
2.1 Analisis Struktur Kota Probolinggo .....	23
2.1.1 Analisis Sumber Daya Manusia .....	23
2.1.2 Analisis Sumber Daya Pemerintahan .....	25
2.1.3 Analisis Keuangan Daerah .....	27
2.2 Analisis Infrastruktur Kota Probolinggo .....	29
2.2.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah .....	29
2.2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah .....	31
2.2.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah .....	36
2.3 Analisis Suprastruktur Kota Probolinggo .....	38
2.3.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah .....	38
2.3.2 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah .....	40
2.3.3 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah .....	43

### BAB III

ANALISIS GAP .....	44
--------------------	----

### BAB IV

ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY .....	48
4.1 Sasaran Smart City Daerah .....	48
4.1.1 Smart Governance .....	48
4.1.2 Smart Branding .....	50
4.1.3 Smart Economy .....	52
4.1.4 Smart Living .....	53

4.1.5 Smart Society .....	59
4.1.6 Smart Environment .....	60
4.2 Analisis Visi Pembangunan Daerah .....	61
LAMPIRAN .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Tahun 2017 .....	2
Tabel 2	Jumlah penduduk per Kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2017 .....	3
Tabel 3	Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2016 - 2017 .....	4
Tabel 4	Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2016-2017 .....	4
Tabel 5	Data Hasil Produksi Bahan Makanan 2016 – 2017 .....	6
Tabel 6	Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2016 -2017 .....	6
Tabel 7	Data Produksi Peternakan Tahun 2016-2017 .....	7
Tabel 8	Data Produksi Perikanan Tahun 2016 - 2017 .....	7
Tabel 9	Data Profil Industri Tahun 2016-2017 .....	8
Tabel 10	Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2016-2017 .....	9
Tabel 11	Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2017 .....	9
Tabel 12	UMKM Tahun 2016-2017 .....	9
Tabel 13	Potensi Wisata Kota Probolinggo Tahun 2017 .....	10
Tabel 14	Hunian Hotel dan Penginapan Kota Probolinggo Tahun 2017 .....	11
Tabel 15	Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013-2017 .....	12
Tabel 16	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha 2014 – 2017 .....	14
Tabel 17	Capaian dan target Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 .....	17
Tabel 18	Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo .....	22
Tabel 19	Backlog Perumahan Kota Probolinggo .....	22
Tabel 20	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2010-2016 .....	24
Tabel 21	Data PNS Daerah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 2018 .....	25
Tabel 22	Data Pegawai Berlatar Belakang Pendidikan TIK .....	26
Tabel 23	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah .....	28
Tabel 24	Total Belanja TI Pemerintah Kota Probolinggo .....	29
Tabel 25	Capaian Indeks Infrastruktur Kota Probolinggo .....	29
Tabel 26	Capaian Infrastruktur Digital Kota Probolinggo .....	31
Tabel 27	Data aplikasi yang sudah diimplementasikan di Kota Probolinggo .....	32
Tabel 28	Data Capaian Infrastruktur Sosial di Kota Probolinggo .....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Administrasi Kota Probolinggo .....	1
Gambar 2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2017 .....	13
Gambar 3	Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur .....	13
Gambar 4	PDRB Perkapita (Juta Rp), 2012 - 2017 .....	15
Gambar 5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 (Metode Baru) .....	24

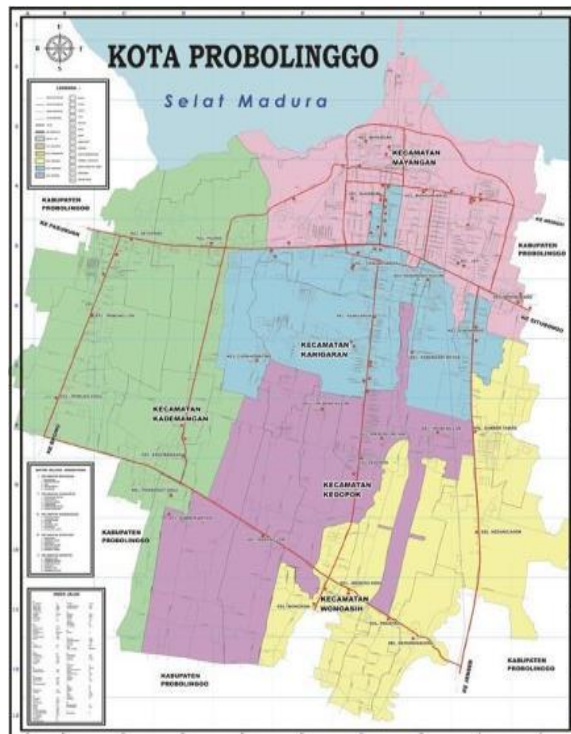
## BAB I ANALISIS MASA DEPAN

### 1.1 Perkembangan Kota Probolinggo

#### 1.1.1 Letak Geografis

Kota Probolinggo adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur yang terletak sekitar 100 km sebelah tenggara Surabaya, Kota Probolinggo terletak di wilayah tapal kuda Jawa Timur dan menjadi jalur utama pantai utara yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Secara geografis, Kota Probolinggo merupakan dataran rendah dengan ketinggian 4-36 meter di atas permukaan laut, terletak antara 7°43'41" sampai dengan 7°49'04" Lintang Selatan dan 113°10' sampai dengan 113°15' Bujur Timur dengan luas wilayah 56,667 Km<sup>2</sup>. Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit yang menghubungkan kota-kota ( sebelah timur kota ) : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dengan kota-kota (sebelah barat kota) : Pasuruan, Malang, Surabaya. Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Leces, Wonomerto, Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo



**Gambar 1 Peta Administrasi Kota Probolinggo**

Wilayah administrasi Kota Probolinggo terbagi dalam 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 29 Kelurahan yang terdiri dari Kecamatan Mayangan terdapat 5 Kelurahan, Kecamatan Kademangan terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Wonoasih terdapat 6 Kelurahan, Kecamatan Kedopok terdapat 6 Kelurahan dan Kecamatan Kanigaran terdapat 6 Kelurahan (Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan) Adapun pembagian luas wilayah, jumlah Kelurahan, Jumlah RT dan RW dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Pembagian Wilayah Administrasi Tahun 2017**

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km <sup>2</sup> )	JUMLAH KELURAHAN	RW	RT
1. Kademangan	12,754	6	33	175
2. Kedopok	13,624	6	35	143
3. Wonoasih	10,981	6	39	189
4. Mayangan	8,655	5	42	258
5. Kanigaran	10,653	6	51	260
<b>Jumlah</b>	<b>56,667</b>	<b>29</b>	<b>200</b>	<b>1,025</b>

*Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2017*

Pada Umumnya wilayah Kota Probolinggo beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tertinggi di bulan Januari sebesar 411 mm sedangkan hari hujan terlama terjadi pada bulan Januari selama 13 hari hujan. Curah hujan terendah pada bulan Agustus, dengan temperatur terendah mencapai 26°C dan tertinggi mencapai 32°C.

Kota Probolinggo mempunyai perubahan iklim sebanyak 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal musim penghujan berada pada bulan Nopember hingga April, sedangkan musim kemarau berada pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober setiap tahunnya. Kota Probolinggo juga dipengaruhi terjadinya angin kering yang bertiup cukup kencang dari arah tenggara ke barat laut, yang populer dengan sebutan “Angin Gending”.

Secara umum kondisi dan struktur tanah Kota Probolinggo cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pengairan yang cukup, sehingga memungkinkan pengembangan lahan sawah untuk tanaman pangan maupun hortikultura, khususnya bawang merah. Pola penggunaan tanah di Kota Probolinggo ternyata masih terdapat lahan sawah seluas 1.792,50 hektare. Lahan bukan sawah seluas 917,25 hektare yang terbagi atas lahan tegal/kebun seluas 627,50 hektare, lahan ditanami pohon/hutan rakyat seluas 106,52 hektare dan lahan lainnya (tambak, kolam, pekarangan, ditanami tanaman pertanian dll) seluas 183,24 hektare, bukan lahan pertanian seluas 2.956,17 hektare. Melihat potensi dan pemanfaatan wilayah demikian itu banyak

alternatif yang bisa dipilih untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan potensi daerah terutama dibidang pertanian.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kota Probolinggo mempunyai ketinggian terendah dengan 0-4 meter diatas permukaan laut yaitu Kecamatan Mayangan. Kecamatan Wonoasih merupakan kecamatan dengan jarak terjauh yaitu 7,7 km. Semakin ke wilayah selatan , ketinggian dari permukaan air laut semakin besar. Wilayah Kota Probolinggo dialiri oleh 6 sungai yaitu sungai Kedunggaleng, Umbul, Banger, Legundi, Kasbah dan Pancur dengan rata-rata panjang aliran 3,80 Km, yang terpanjang adalah sungai Legundi dengan panjang aliran 5,439 Km.

### 1.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan data dari konsolidasi bersih Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo pada Tahun 2017 sebanyak 235.440 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu sebanyak 232.285 jiwa. Dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 116.887 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 118.553 jiwa, maka jumlah penduduk Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 3.155 jiwa dalam satu tahun. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Probolinggo pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,35 %, yakni dari 1,04 % di tahun 2016 meningkat menjadi 1,35 % di tahun 2017. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2017 adalah 4.155 jiwa/Km<sup>2</sup> artinya setiap 1 km<sup>2</sup> terdapat 4.155 orang yang tinggal di area tersebut . Berikut ini tabel 1.02 adalah jumlah penduduk Kota Probolinggo berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2017.

**Tabel 2 Jumlah penduduk per Kecamatan dan jenis kelamin Tahun 2017**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kademangan	21.138	21.428	42.566
3	Wonoasih	17.342	17.392	34.734
3	Mayangan	31.620	32.183	63.803
4	Kanigaran	29.600	30.230	59.830
5	Kedopok	17.187	17.320	34.507
<b>Kota Probolinggo</b>		<b>116.887</b>	<b>118.553</b>	<b>235.440</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017



Apabila diperhatikan dalam tabel 1.02 Jumlah penduduk perempuan di Kota Probolinggo sebanyak 118.553 jiwa sedangkan jumlah penduduk laki-laki di Kota Probolinggo sebanyak 116.887 jiwa, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki yaitu selisih 1.666 jiwa.

Adapun gambaran penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3 Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2016 - 2017**

No	Usia (th)	2016	2017
1	0-4	9.357	12.796
2	5-9	18.685	15.954
3	10-14	18.491	32.696
4	15-19	19.481	20.057
5	20-24	18.929	18.887
6	25-29	17.844	17.775
7	30-34	18.169	18.055
8	35-39	19.371	19.264
9	40-44	17.992	17.910
10	45-49	18.135	17.992
11	50-54	15.661	15.402
12	55-59	13.064	12.785
13	60+	26.106	15.867
	<b>Total</b>	<b>232.285</b>	<b>235.440</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017

Apabila diperhatikan dalam tabel 1.03 sekitar 67,16 persen penduduk Kota Probolinggo termasuk usia produktif (15–60 tahun) dan sekitar 32,84 persen masuk dalam kelompok penduduk usia non produktif (0-14 tahun) dan (60 tahun keatas). Berdasarkan komposisi penduduk tersebut maka relatif cukup baik dan tentunya didukung dengan kualitas sumber daya manusianya (kualitas jasmani rohani).

Adapun gambaran penduduk berdasarkan pendidikan terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4 Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2016-2017**

No	Kelompok umur	2016	2017
1	Tidak/ belum sekolah	47.988	49.265
2	Belum tamat SD	19.586	20.436
3	Tamat SD	56.946	56.286
4	Tamat SLTP	31.189	31.625
5	Tamat SLTA	58.453	59.284
6	Diploma I/II	1.356	1.299
7	Diploma III	2.596	2.649
8	Sarjana (S1)	13.122	13.513
9	Sarjana (S2)	1.030	1.061
10	Sarjana (S3)	19	22
	<b>Total</b>	<b>232.285</b>	<b>235.440</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil, 2017

Penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun 2016 untuk lulusan SLTP, SLTA, Diploma III, Sarjana sampai dengan tingkat doktor, hal ini menggambarkan kualitas sumber daya manusia (pendidikan) penduduk Kota Probolinggo semakin meningkat dan berkualitas. Dan Kota Probolinggo memiliki daya tarik tersendiri guna peningkatan layanan jasa pendidikan formal maupun informal.

### **1.1.3 Pertanian**

Pertanian merupakan roda penggerak ekonomi nasional, selain bertujuan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat, sektor pertanian juga berguna untuk mendongkrak citra Indonesia dimata dunia, sektor pertanian terus memberi kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia. Pada wilayah selatan jumlah luasan lahan pertanian masih bisa dioptimalkan untuk mendukung total produksi pangan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menunjukkan trend yang tidak begitu baik. Hal ini dimungkinkan karena berkembangnya sektor lain dalam perekonomian Kota Probolinggo, juga dipengaruhi oleh menurunnya jumlah luasan lahan pertanian, hal ini merupakan faktor lain yang cukup berpengaruh. Sektor pertanian meliputi tanaman pangan.

Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri yang setiap tahunnya cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga dari sisi ketahanan pangan nasional fungsinya menjadi amat penting dan strategis. Komoditas tanaman pangan di Kota Probolinggo antara lain yaitu padi, jagung dan bawang merah. Jagung adalah komoditas potensial di Kota Probolinggo, Kota Probolinggo cocok untuk ditanami jagung baik dari segi tanah, air dan cuaca. Didukung dengan pola tanam padi dan jagung maka membuat produksi jagung melimpah sehingga banyak masyarakat yang berusaha melakukan pengolahan jagung menjadi marning jagung yaitu di Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih. Bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang potensial ditanam di Kota Probolinggo, karena rasa dan warnanya tidak dimiliki oleh produk bawang merah dari daerah lainnya. Adapun komoditi tanaman pangan di Kota Probolinggo pada tahun 2017, tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 5 Data Hasil Produksi Bahan Makanan 2016 – 2017**

Jenis	Produksi (ton)		luas panen (ha)		Rata-rata produksi (kw/ha)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Padi	17.742,00	15.880,20	2.590,00	2.388,00	68,50	66,50
Jagung	35.000,00	29.736,72	5.000,00	4.212,00	70,00	70,60
Bawang Merah	722,00	3.680,00	147,00	396,00	49,14	92,90

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017

#### 1.1.4 Perkebunan

Secara ekonomi Kota Probolinggo tidak termasuk kategori yang memiliki lahan perkebunan, sehingga usaha perkebunan rakyat hanya sebatas usaha sampingan sebagai penunjang kehidupan keluarga akan tetapi sektor perkebunan diupayakan pengembangan dan peningkatan produksinya oleh Pemerintah Kota Probolinggo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Berikut Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditinya Tahun 2016-2017 :

**Tabel 6 Luas Panen dan Produksi Perkebunan Kota Probolinggo Tahun 2016 -2017**

Komoditi	Luas Panen (ha )		Produksi (ton)	
	2016	2017	2016	2017
Tembakau	210	-	1,86	-
Tebu	27,24	28,54	2.446,47	2.824,00
Kelapa	5,48	5,48	21,71	21,73
Kapuk Randu	2,06	1,89	0,55	0,56

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017

#### 1.1.5 Peternakan

Peternakan merupakan sektor yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha dimasa depan, untuk itu Pemerintah Kota Probolinggo berupaya mengembangkan usaha pembibitan sapi lokal peranakan ongole (PO) dengan pendekatan agribisnis. Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan salah satu sumberdaya genetik lokal yang telah terstandarisasi dan memiliki acuan SNI tersendiri. Kondisi secara nasional saat ini menunjukkan bahwa populasi sapi PO semakin menurun. Sapi PO yang ada di masyarakat saat ini secara genetik telah bercampur dengan genetik dari ras-ras sapi lainnya karena kurang terkontrolnya fase perkawinan. Keadaan ini menyebabkan semakin lama produktifitas sapi PO semakin menurun baik dalam hal performans eksterior, produksi maupun reproduksinya. Karena itu dilakukan upaya pemurnian genetik sapi PO dalam rangka meningkatkan produktifitas sapi PO ini sekaligus untuk melestarikan sumber daya

genetik. Ternak sapi PO bantuan pemerintah yang dipercayakan dikelola kelompok ini telah berkembang sangat signifikan dari 18 ekor pada tahun 2006 menjadi 85 ekor pada tahun 2011 ini. Dengan ditambahkan beberapa induk-induk baru, pada akhir tahun 2015, populasi sapi PO di kelompok ini telah menjadi sekitar 205 ekor. Adapun data hasil Peternakan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

**Tabel 7 Data Produksi Peternakan Tahun 2016-2017**

Jenis Ternak	Jumlah Populasi (ekor)		Daging (Ton)		Telur (Ton)		Susu (Ton)	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Sapi Potong	9.592	9.983	468.079	472.108				
Sapi Perah	217	218					438.905	441.373
Kambing	7.703	7.858	29.757	31.164				
Kuda	12	12						
Ayam Buras	78.761	80.355	89.839	92.187	53.164	54.240		
Ayam Ras Petelur	11.550	11.850	1.353	1.422	77.339	120.159		
Ayam Ras Pedaging	36.325	39.350	1.563.841	1.566.511				
Itik	800	842	20.461	21.170				

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2017

#### 1.1.6 Perikanan

Wilayah Kota Probolinggo secara geografis terletak disebelah utara Pulau Jawa berbatasan langsung dengan Selat Madura dengan panjang pantai sekitar 7 Km, potensi di sektor perikanan Kota Probolinggo boleh dibilang berlimpah, hal ini juga ditunjang dengan sarana Pelabuhan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan sebagai potensi pengembangan bisnis perikanan laut. Selain itu, Pemerintah Kota Probolinggo juga berusaha mengoptimalkan perikanan air payau yaitu melalui perikanan tambak dan kolam. Berikut ini data produksi perikanan di Kota Probolinggo pada tahun 2016-2017 :

**Tabel 8 Data Produksi Perikanan Tahun 2016 - 2017**

Jenis	2016	2017
<b>Perikanan Tangkap</b>		
Jumlah Produksi	19.748,586 Ton	19.249.600 Ton
Nilai Produksi	Rp. 419.394.901.500	Rp. 408.165.295.300
<b>Perikanan Budidaya</b>		
Jumlah Produksi	487,21 Ton	461,430 Ton
Nilai Produksi	Rp. 10.314.660.000	Rp. 10.437.030.000

Sumber : Dinas Perikanan, 2017

Produksi perikanan tangkap dan budidaya pada Tahun 2017 mengalami penurunan . Untuk perikanan tangkap, selain disebabkan oleh cuaca buruk juga disebabkan oleh jumlah armada perikanan (Kapal Balai) yang mengalami penurunan. Sedangkan penurunan produksi budidaya dikarenakan sering terjadi hujan deras yang mengakibatkan pematang tambak jebol sehingga terjadi gagal panen dan menyebabkan produksi budidaya air payau tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berbanding terbalik dengan jumlah produksinya, nilai produksi budidaya mengalami kenaikan dikarenakan komoditas yang mempunyai harga yang tinggi seperti udang vanamel mengalami kenaikan produksi, disaat komoditas produksi budidaya yang lain mengalami penurunan jumlah produksi

### 1.1.7 Industri dan Perdagangan

Peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi di suatu negara sangat penting karena sektor industri memiliki beberapa keunggulan dalam hal akselerasi pembangunan. Keunggulan-keunggulan sektor indudtri tersebut diantaranya memberikan kontribusi bagi penyerapan tenaga kerja dan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi pada berbagai komoditas yang dihasilkan. Sektor industri diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional dan telah menempatkan industri manufaktur sebagai penghela sektor riil. Kegiatan sektor industri di Kota Probolinggo cukup berpotensi, baik industri besar, industri menengah, industri kecil maupun industri rumah tangga (home industry). Berikut ini keadaan industri Kota Probolinggo berdasarkan kelompok industri :

**Tabel 9 Data Profil Industri Tahun 2016-2017**

Jenis	2016	2017
Industri agro dan kimia (IAK)	941	946
Industri logam, mesin, tekstil dan aneka (ILMTA)	167	158
Industri alat transportasi, elektronika dan telematika (IATT)	2	11
<b>Total Industri</b>	<b>1.110</b>	<b>1.115</b>
<b>Nilai produksi</b>	<b>5.319.032.842.300</b>	<b>3.297.448.097.316</b>
<b>Nilai Investasi</b>	<b>260.254.100.400</b>	<b>139.970.900.889</b>

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang di Kota Probolinggo. Kontribusinya terhadap PDRB juga terus mengalami peningkatan. Sektor Perdagangan turut memainkan peran penting dalam menggerakkan dan membangkitkan roda perekonomian di Kota Probolinggo, Hal ini dibuktikan oleh besarnya kontribusi sektor perdagangan dalam pembentukan

PDRB Kota Probolinggo. Menyadari hal tersebut maka Pemerintah Kota Probolinggo mendorong penataan dan pembangunan pusat-pusat perdagangan yang ada di wilayah ini. Berikut ini data perkembangan pasar dan toko di Kota Probolinggo.

**Tabel 10 Perkembangan Pasar dan Toko di Kota Probolinggo Tahun 2016-2017**

Jenis	2016	2017
Pasar Tradisional / Rakyat (Milik Pemerintah Kota Probolinggo )	11	11
Pasar Tradisional /Rakyat (Milik Perorangan/swasta)	5	5
Toko Modern /swalayan	33	49
Pasar Ikan	1	1
Pasar Hewan	1	1

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian, 2017

Sedangkan investasi di Kota Probolinggo relatif mengalami peningkatan sejak tahun 2012-2017.

**Tabel 11 Perkembangan Investasi di Kota Probolinggo Tahun 2017**

No	Tahun	Nilai	Investor
1.	2012	1.308.446.333.336,00	47
2.	2013	744.400.016.381,00	40
3.	2014	2.670.411.503.680,00	43
4.	2015	1.824.377.467.566,00	48
5.	2016	740.612.581.171,00	64
6.	2017	4.121.827.395.289,68	69

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2017

**Tabel 12 UMKM Tahun 2016-2017**

No	Uraian	2016	2017
1.	Usaha Mikro	5.480	5.505
2.	Usaha Kecil	41	41
3.	Usaha Menengah	16	16
	<b>Jumlah</b>	<b>5.537</b>	<b>5.562</b>

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian, 2017

### 1.1.8 Pariwisata

Sebagai kota transit yang menghubungkan kota-kota di sebelah barat dan timur di Provinsi Jawa Timur dan sebagai tempat transit bagi wisatawan yang sedang melakukan perjalanan dari kota-kota di Jawa dan Bali maka Kota Probolinggo telah berkembang menjadi kota tujuan wisata, hiburan dan kuliner, dengan berbagai fasilitas yang tersedia bagi para wisatawan. Dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan pariwisata di Kota Probolinggo, Pemerintah Kota Probolinggo berusaha untuk ,mengembangkan yaitu wisata budaya, wisata religi dan wisata buatan yang diharapkan dapat menjadikan Kota Probolinggo sebagai tempat tujuan wisata yang sangat diminati oleh para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2017 sebanyak 969.203 wisatawan, yang terdiri dari 965.555 wisatawan domestik dan 3.648 wisatawan mancanegara. Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 jumlah wisatawan sebanyak 543.786 wisatawan, maka terjadi peningkatan sebanyak 425,417 wisatawan atau 43,89%. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan disamping adanya peningkatan kualitas pelayanan wisata di beberapa daya tarik wisata seperti obyek wisata Bee Jay Bakau Resort (BJBR) yang merupakan obyek wisata primadona di Kota Probolinggo, juga dikarenakan adanya peningkatan angka kedatangan kapal pesiar ke Kota Probolinggo sebanyak 6 kali selama Tahun 2017 ini. Juga dengan kegiatan promosi bersama dengan pelaku pariwisata antara lain biro perjalanan wisata dan pengelola obyek wisata swasta serta informasi pariwisata melalui media cetak dan media elektronik. Berikut potensi wisata yang ada di Kota Probolinggo.

**Tabel 13 Potensi Wisata Kota Probolinggo Tahun 2017**

No	Daerah Tujuan Wisata	Alamat	TOTAL	
			Wisman	Wisnus
1	Taman Wisata Studi Lingkungan (TWSL)	Jl. Basuki Rachmad Probolinggo	-	98,014
2	Museum Probolinggo	Jl. Suroyo Probolinggo	1,201	20,078
3	Museum Dr. Moh Saleh	Jl.DR.Moh.Saleh No 1 Probolinggo	16	6,096
4	Gereja Merah	Jl. Suroyo No.32 Probolinggo	1,027	5,120
5	Klenteng Tri Dharma	Jl. Wr. Supratman No.127 Probolinggo	891	2,204
6	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pelabuhan PPP Probolinggo	23	641,326
7	Kolam Renang Bayuangga	Jl. Hayam Wuruk Probolinggo	-	67,268
8	Kolam Renang Olympic	Jl. Mastrip Probolinggo	-	29,949
9	Bee Jay Bakau Resort (BJBR)	Pelabuhan PPP Mayangan, Kota Probolinggo	490	95,500
		<b>Jumlah</b>	<b>3,648</b>	<b>65,555</b>

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2017

Sedangkan tingkat hunian hotel dan penginapan di Kota Probolinggo sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 14 Hunian Hotel dan Penginapan Kota Probolinggo Tahun 2017**

No	Nama Hotel	Alamat Hotel	Kelas	Jml Kamar	TOTAL	
					Wisman	Wisnus
1	Hotel MORONYOTO	Jl. Raya Bromo No.100A	Melati	57	38	1595
2	Hotel TAMPIARTO	Jl. Suroyo No.15	Bintang 1	81	45	2507
3	Hotel BROMO PARK	Jl. Dr. Sutomo No.79	Bintang 1	22	5613	29087
4	Hotel LAVA-LAVA	Jl. Raya Bromo Km.05	Melati	63	200	945
5	Hotel BROMO VIEW	Jl. Raya Bromo Km.05	Melati	31	111	8056
6	Home Stay HADI"S	Jl. Raya Bromo Km.04	Melati	28	27	930
7	Home Stay WIDURI	Jl. Sukarno Hatta	Melati	11	0	1270
8	Home Stay EBONY	Jl. Gubernur Suryo	Melati	24	0	3778
9	Home Stay DARMO	Jl. Butono No.03	Melati	37	289	690
10	Home Stay DIPONEGORO	Jl. Diponegoro	Melati	45	117	2375
11	Home Stay WAHIDIN	Jl. Dr. Wahidin No.07	Melati	21	290	5639
12	Home Stay ANGGREK	Jl. Anggrek No.02	Melati	16	0	446
13	Hotel RATNA	Jl. Panglima Sudirman No.16	Melati	39	84	1125
14	Hotel BROMO PERMAI II	Jl. Panglima Sudirman No.237	Melati	35	24	1775
15	Home Stay SINAR HARAPAN	Jl. Bengawan Solo No.100	Melati	16	105	952
16	Hotel PARAMITHA	Jl. Siaman No.07	Melati	40	11	2296
17	Home Stay HASRAT MULIA	Jl. Lingkar Utara	Melati	15	0	442
18	Bungalow BJBR	Jl. Pelabuhan Perikanan Pantai	Melati	10	37	3156
19	Home Stay CLOVER	Jl. Mawar Merah No.8	Melati	22	1018	420
20	Home Stay PINK HOUSE	Jl. Mawar	Melati	21	11	418
21	SURYA Guest House	Jl. Gubernur Suryo No.02	Melati	23	56	600
22	PASEBAN SENA Hotel	Jl. Suroyo No.50-53	Melati	20	36	1870
23	Home Stay BROMO SUNRISE	Jl. Raya Bromo	Melati	18	243	1016
24	Home Stay HARI'S	Jl. Raya Bromo Km.05	Melati	22	915	1839
25	FEMALE Guest House	Jl. Ahmad Yani	Melati	14	8	1660
26	Home Stay Suyoso	Jl. Suyoso	Melati	32	117	169
	<b>JUMLAH</b>				<b>9395</b>	<b>75056</b>

Sumber : Bappeda Litbang Kota Probolinggo, 2017

### 1.1.9 PDRB

Melalui penghitungan baru sesuai SNA2008, angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Probolinggo Atas Dasar Harga berlaku (ADHB) selama kurun waktu 4 tahun terakhir masing-masing adalah pada Tahun 2013 adalah sebesar 6,56 trilyun rupiah, Tahun 2014 sebesar 7,26 trilyun



rupiah, Tahun 2015 sebesar 8,07 trilyun rupiah dan tahun 2016 sebesar 8,88 trilyun rupiah. Tahun 2017 diestimasikan sebesar 9,83 trilyun rupiah. Perubahan tahun dasar dari 2000 ke 2010 menyebabkan perubahan nilai PDRB yang dihitung atas dasar konstan. Sementara angka PDRB Kota Probolinggo Atas Dasar Harga Kontan (ADHK) Tahun 2010 selama kurun waktu 4 tahun terakhir adalah sebesar 5,91 trilyun rupiah di Tahun 2013, Tahun 2014 sebesar 6,26 trilyun rupiah, Tahun 2015 sebesar 6,63 trilyun rupiah dan Tahun 2016 sebesar 7,02 trilyun rupiah. Tahun 2017 diestimasikan sebesar 7,42 trilyun rupiah. Secara rinci Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2012- 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

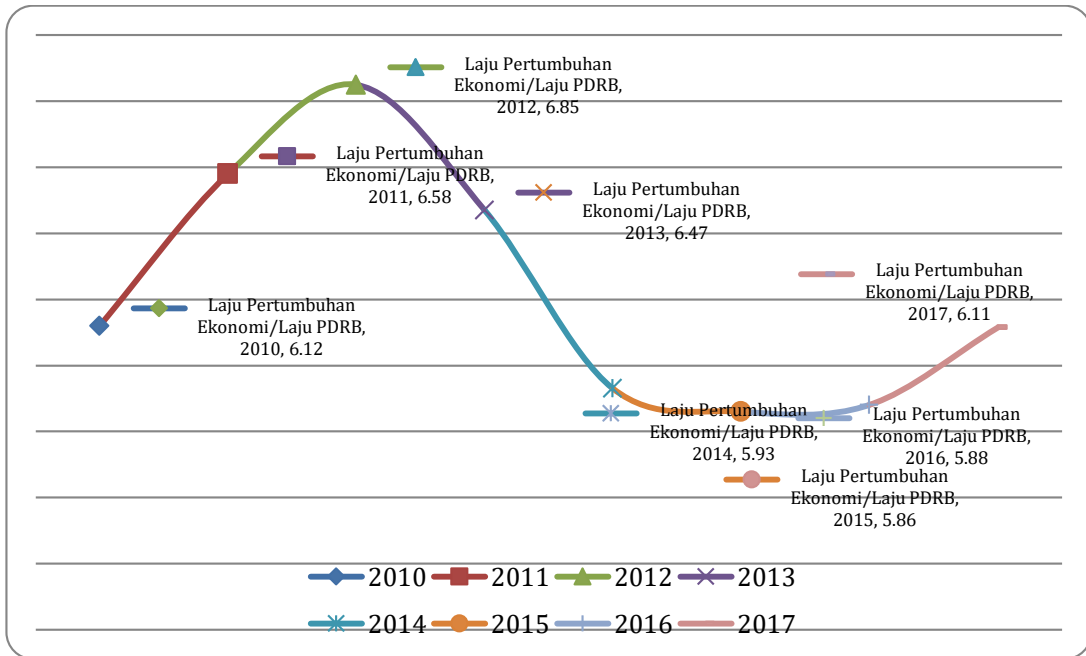
**Tabel 15 Indikator Makro Kota Probolinggo Tahun 2013-2017**

<b>Uraian</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
PDRB (ADHB) juta Rp	6.563.967,59	7.260.721,51	8.072.103,96	8.888.108,89	9.808.523,17*
PDRB (ADHK) juta Rp	5911290,95	6.261.886,47	6.628.754,75	7.018.290,81	7.446.025,33*
Laju Pertumbuhan Ekonomi/Laju PDRB	6,47	5,93	5,86	5,88	5.88
Jumlah Penduduk (jiwa)	223.881	226.777	229.013	231.112	235.440
PDRB ADHB per kapita (Rp)	2.931.900	3.201.701	3.524.736	3.845.802	41.660.394*
Inflasi (persen)	7,98	6,79	2,11	1,53	3,18
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,48	5,16	4,01	3,72*	3,42*

Sumber : BPS, 2017

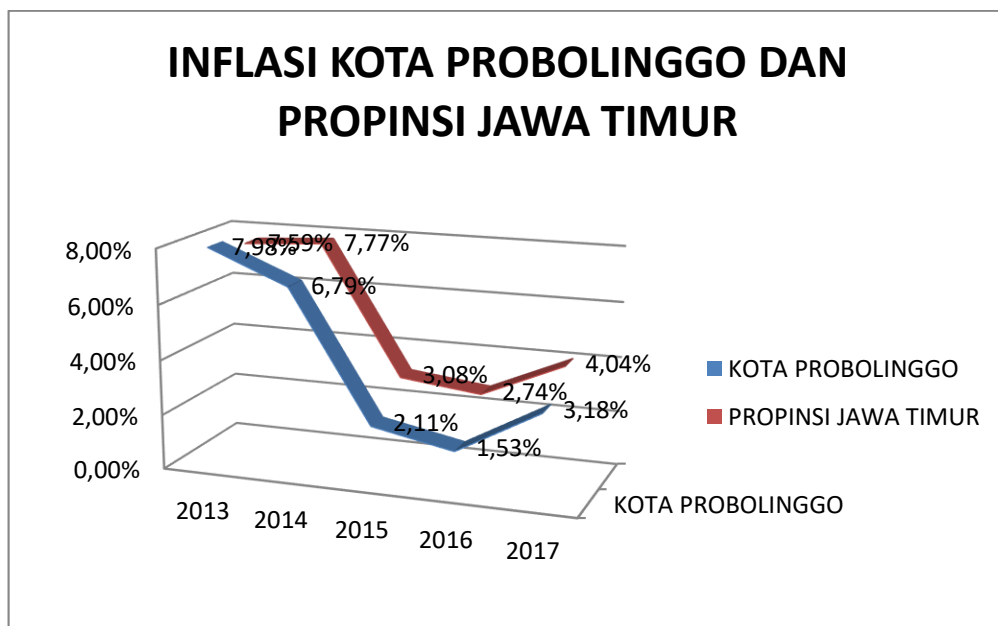
Keterangan : \* Estimasi Bappeda Litbang Kota Probolinggo (belum ada rilis data BPS)

Menurut data dari BPS laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 4,10%, kemudian tahun 2013 perekonomian melambat pertumbuhannya menjadi sebesar 6,47 (menurun 5,54%) dan melambat kembali hingga sebesar 5,93 pada tahun 2014 dan 5,86 pada tahun 2015. Baru pada Tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 5,88 (mengalami peningkatan 0,34% dari tahun 2015. Untuk Tahun 2017 berdasarkan perhitungan sementara dikarenakan belum adanya rilis data dari BPS, laju pertumbuhan ekonomi diestimasikan kembali meningkat dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 6,11. Estimasi peningkat pertumbuhan ekonomi dimaksud dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010-2016. Untuk menggambarkan trend pertumbuhan ekonomi selama 8 (delapan) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



**Gambar 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2010 - 2017**

Menurut data dari BPS Kota Probolinggo inflasi di Kota Probolinggo pada tahun 2016 mencapai 1,53 % mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2017. Inflasi tahun 2017 mencapai 3,18 %. Terjadinya kenaikan karena ada komoditi transportasi pada bulan Juni menjelang Hari Raya Idul Fitri yang menyumbang inflasi cukup besar, juga disebabkan adanya penyesuaian tarif listrik dan biaya perpanjangan STNK. Berikut ini Inflasi Kota Probolinggo dan Propinsi Jawa Timur:



**Gambar 3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Probolinggo dan Provinsi Jawa Timur**

Menurut data dari BPS Tahun 2014 - 2016 terdapat 7 sektor ekonomi yang tercatat mengalami pertumbuhan positif yang menunjukkan adanya perkembangan struktur perekonomian Kota Probolinggo dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Struktur perekonomian dominan Kota Probolinggo yaitu : (1) Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (24,36%), (2) sektor industri pengolahan (16,59%), dan (3) sektor transportasi dan pergudangan (13,59%). Berdasarkan hasil estimasi untuk Tahun 2017 mengingat belum adanya rilis dari BPS, laju pertumbuhan ekonomi masing-masing lapangan usaha masih tetap sama dengan Tahun 2014-2016 dengan pertumbuhan positif dari 7 sektor, yaitu : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Asuransi, Real Estat, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

**Tabel 16 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo Menurut Lapangan Usaha 2014 – 2017**

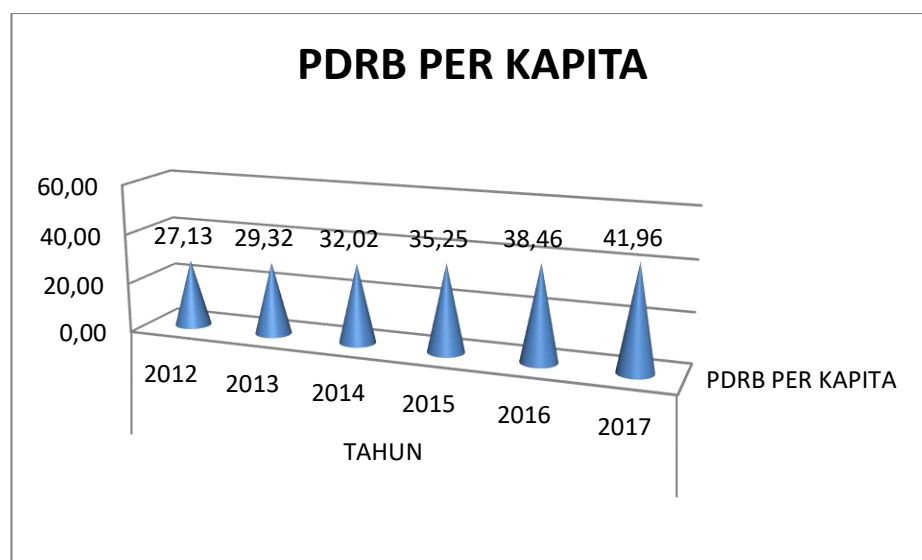
Lapangan Usaha		ADHK				ADHB			
		2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.56	6.42	6.17	5,98	6.94	6.82	6.71	6,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
C	Industri Pengolahan	16.74	16.68	16.59	16,52	15.75	15.72	15.35	15,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.12	0.12	0.11	0,11	0.10	0.10	0.10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	0.24	0.23	0,22	0.24	0.22	0.21	0,20
F	Konstruksi	6.17	6.05	6.10	6,07	6.16	5.97	5.97	5,88
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.04	24.17	24.36	24,52	24.44	24.73	25,4	25,89
H	Transportasi dan Pergudangan	13.45	13.57	13.59	13,66	13.17	13.40	13.46	13,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.16	3.25	3.33	3,42	3.47	3.66	3.85	4,06
J	Informasi dan Komunikasi	5.78	5.86	6.03	6,16	5.04	4.94	4.90	4,83
K	Asuransi	5.96	6.03	6.14	6,23	6.58	6.68	6.94	7,13
L	Real Estat	3.08	3.08	3.11	3,13	2.99	3.02	3.02	3,04
M,N	Jasa Perusahaan	0.64	0.64	0.63	0,63	0.65	0.63	0.62	0,61

Lapangan Usaha		ADHK				ADHB			
		2014	2015	2016	2017*	2014	2015	2016	2017*
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.93	4.87	4.68	4,56	5.19	4.99	4.82	4,65
P	Jasa Pendidikan	4.71	4.69	4.68	4,67	4.97	4.86	4.88	4,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.87	0.88	0.89	0,90	0.89	0.88	0.89	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.56	3.46	3.35	3,25	3.43	3.37	3.24	3,15
	<b>Produk Domestik Regional Bruto Kota Probolinggo</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS, 2017

Keterangan : \* Tahun 2017 : Estimasi Bappeda Litbang Kota Probolinggo (belum ada rilis data BPS)

Satu indikator yang dapat digunakan mengukur kesejahteraan masyarakat adalah besaran PDRB dan pendapatan perkapita. Pada tahun 2016, PDRB per kapita Kota Probolinggo mencapai 38,46 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 PDRB per kapita diestimasikan naik sebesar 41,96 juta rupiah .



Gambar 4 PDRB Perkapita (Juta Rp), 2012 - 2017

Dari gambar diatas tampak bahwa dalam selang enam tahun terakhir, terjadi peningkatan nilai PDRB per kapita Kota Probolinggo tiap tahunnya. Hal inimenunjukkan bahwa secara umum kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari tahun ke tahun semakin membaik.

## **1.2 Analisis Masa Depan**

Arah pembangunan smart city Kota Probolinggo diwujudkan melalui pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan, pembangunan sosial, pemerintahan yang smart, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan dukungan teknologi komunikasi dan informasi terbaru.

**Tabel 17 Capaian dan target Infrastruktur Kota Probolinggo Tahun 2014-2019**

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
1	Jaringan Jalan	Kondisi jalan	Prosentase kondisi jalan (baik, sedang)	74.28	63.58	75.00	65.82	80.00	65.82	85.00	95.94	95.00	97.00
		Fasilitas pelengkap jalan	Prosentase panjang jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan	35.00	34.17	35.00	34.03	42.00	40.70	68.00	67.18	69.00	71.00
		Prasarana transportasi	Prosentase jumlah prasarana transportasi (terminal, halte/shelter, pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang)	85.00	84.62	90.00	88.46	93.00	92.31	95.00	96.15	98.00	100.00
		Tingkat konektivitas	Prosentase konektivitas jalan	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00	89.00
<b>Jaringan Jalan</b>				<b>70.82</b>	<b>67.84</b>	<b>72.25</b>	<b>69.33</b>	<b>76.00</b>	<b>71.96</b>	<b>84.25</b>	<b>87.07</b>	<b>87.75</b>	<b>89.25</b>
2	Angkutan Umum	Jumlah ijin trayek	Prosentase perpanjangan ijin trayek	90	88.37	91.00	87.75	92.00	92.65	93.00	86.27	94	96
		Angkutan Umum (cakupan layanan)	Prosentase Ruas Jalan yang dilalui angkutan umum	55	54.59	55	54.59	55	54.59	55	54.59	55	55

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
		angkutan umum)											
<b>Angkutan Umum</b>				<b>72.50</b>	<b>71.48</b>	<b>73.00</b>	<b>71.17</b>	<b>73.50</b>	<b>73.62</b>	<b>74.00</b>	<b>70.43</b>	<b>74.50</b>	<b>75.50</b>
3	Air Bersih	Tingkat pelayanan air bersih	Prosentase Penduduk dengan akses air bersih aman	94.00	87.38	95.00	91.04	96.00	96.07	97.00	98.04	98.50	100.00
			Prosentase RT atau terlayani Air Bersih (perpipaan PDAM)	45	43.85	50	49.10	55	47.33	60	57.90	65	70
<b>Air Bersih</b>				<b>69,5</b>	<b>65,615</b>	<b>72,5</b>	<b>70,07</b>	<b>75,5</b>	<b>71,7</b>	<b>78,5</b>	<b>77,97</b>	<b>81,75</b>	<b>85</b>
4	Limbah	Tingkat pelayanan air limbah	Prosentase penduduk yang terlayani tangki septik, MCK komunal, SPAL terpusat	75.00	74.53	80.00	78.24	90.00	85.23	90.00	85.93	90.00	100.00
		Tingkat pelayanan jaringan persampahan	Prosentase sampah masuk TPA	27.00	25.80	30.00	26.69	33.00	29.18	35.00	33.95	37.00	40.00
			Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah	73.00	72.19	75.00	73.31	77.00	70.82	79.00	62.93	80.00	82.00
			Prosentase Pengoperasian TPA	70.00	68.00	70.00	68.00	75.00	70.00	75.00	72.00	75.00	80.00

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur										
				2014		2015		2016		2017		2018	2019	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target	
<b>Air Limbah</b>				<b>61.25</b>	<b>60.13</b>	<b>63.75</b>	<b>61.56</b>	<b>68.75</b>	<b>63.81</b>	<b>69.75</b>	<b>63.70</b>	<b>70.50</b>	<b>75.50</b>	
5	Irigasi dan drainase	Tingkat pelayanan irigasi	Persentase saluran irigasi, sungai, drainase dalam kondisi mantap	81.00	80.77	83.00	80.77	85.00	83.08	87.00	85.39	89.00	91.00	
			Prosentase luas tanam irigasi teknis	53.00	49.03	55.00	51.06	58.00	53.06	60.00	55.10	65.00	70.00	
			Prosentase Luas daerah rawan genangan	42	42	43	42	44	42	45	33,23	46	47	
<b>Irigasi dan Drainase</b>				<b>58.67</b>	<b>57.27</b>	<b>60.33</b>	<b>57.94</b>	<b>62.33</b>	<b>59.38</b>	<b>64.00</b>	<b>60.83</b>	<b>66.67</b>	<b>69.33</b>	
6	Komunikasi dan informasi	Tingkat jaringan informasi dan komunikasi	Prosentase jumlah BTS berijin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
<b>Komunikasi dan informasi</b>				<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
7	Fasilitas Publik	Tingkat pelayanan RTH Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase luasan RTH publik yang tersedia	4.50	4.77	4.50	4.77	5.00	7,34	5.50	7.35	8.00	8.50	
			Prosentase layanan posyandu	100.00	99.54	100.00	99.54	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Prosentase layanan apotik eksisting	100.00	80.00	100.00	80.00	100.00	83.33	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00



No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
			Prosentase layanan puseksmas eksisting	100	75.00	100	75.00	100	75.00	100	75.00	100	100
			Prosentase layanan Dokter (umum+spesialis)	100	300	100	300	100	300	100	300	100	300
			Prosentase layanan TT Rumah Sakit/jumlah penduduk	100.00	150.44	100.00	148.47	100.00	147.19	100.00	140.50	100.00	100.00
		Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan	Prosentase layanan SD	100	97.4	100	96.4	100	97.6	100	86.4	100	100
			Prosentase layanan SMP	85	84.7	90	85.9	92	87.2	95	87.1	90	100
			Prosentase layanan SMA	85	86.8	90	85.9	90	87.2	90	87.1	90	95
			Ratio Murid SD/Kelas SD	100	88	100	81	100	81	100	84	100	100
			Ratio Murid SMP/KelasSMP	100	83	100	83	100	83	100	83	100	100
			Ratio Murid SMA/Kelas SMA	100	86	100	75	100	81	100	81	100	100
		Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang perekonomian	Prosentase layanan fasilitas perekonomian (pasar) yang dilengkapi fasilitas kamar mandi, WC, sarana persampahan,	55.00	54.55	56.00	54.55	57.00	54.55	58.00	54.55	59.00	60.00

No	Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Perhitungan Capaian dan target Infrastruktur									
				2014		2015		2016		2017		2018	2019
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Target
			kebakaran, ruang parkir, aman, terdapat bedak permanen, dengan sekat tembok dan penutup bedak, fasilitas pos jaga satpam										
			Prosentase layanan koperasi berijin	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			Prosentase layanan bedak yang dihuni	94.00	92.86	95.00	92.86	96.00	92.86	97.00	92.86	98.00	98.00
<b>Fasilitas Publik</b>				<b>88.23</b>	<b>98.87</b>	<b>89.03</b>	<b>98.83</b>	<b>89.33</b>	<b>99.72</b>	<b>89.70</b>	<b>99.32</b>	<b>89.67</b>	<b>104.10</b>
8	IMB	Penerbitan IMB	Prosentase IMB terbit	5.50	5.19	6.00	5.72	6.50	6.41	7.00	6.41	8.00	9.00
<b>Indeks IMB</b>				<b>5.50</b>	<b>5.19</b>	<b>6.00</b>	<b>5.72</b>	<b>6.50</b>	<b>6.41</b>	<b>7.00</b>	<b>6.41</b>	<b>8.00</b>	<b>9.00</b>

Sumber: Bappeda Litbang, 2018

Selain indeks infrastruktur, kinerja infrasturktur juga tergambar dalam kinerja perumahan dan permukiman sebagai berikut.

**Tabel 18 Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo**

No	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2017	Keterangan
1	Pengurangan Luasan Lingkungan Permukiman Kumuh (Hektar)	148,26 Ha	Realisasi capaian ini tidak tercapai dikarenakan luas kawasan perumahan dan permukiman kumuh sesuai SK Walikota Nomor: 188.45/414/KEP/425.012/2015 sekota hanya memiliki luasan 193,56 Ha, sedangkan target pengurangan luasan permukiman kumuh pada Tahun 2017 sebanyak 324,93 Ha.
2	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	97,13%	Capaian ini melebihi target dikarenakan adanya tambahan anggaran yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya
3	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	16,64%	Realisasi ini tidak tercapai dikarenakan masih ada beberapa PSU yang masih perlu adanya peningkatan maupun pemeliharaan dan kedepan perlu adanya dukungan anggaran yang memadai.

Sumber: LKPJ, 2018

**Tabel 19 Backlog Perumahan Kota Probolinggo**

Kecamatan	Jumlah Penduduk 2017 (jiwa)	Jumlah KK 2017 (jiwa)	Jumlah Rumah 2017	Backlog
Kademangan	42.566	14.189	11.186	-3.003
Wonoasih	34.734	11.578	9.197	-2.381
Mayangan	63.803	21.268	15.920	-5.348
Kanigaran	59.830	19.943	14.777	-5.166
Kedopok	34.507	11.502	9.725	-11.149
<b>Total</b>	<b>235.440</b>	<b>78.480</b>	<b>60.805</b>	<b>-77.037</b>

Sumber :

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2018

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2018

## **BAB II**

### **ANALISIS KESIAPAN DAERAH**

Analisis kesiapan smart city daerah merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai kondisi daerah saat ini guna mendapatkan gambaran kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menerapkan program-program pembangunan smart city. Di dalam analisis kesiapan smart city daerah, terdapat tiga aspek utama yang menjadi komponen kajian, yaitu :

- a. Struktur, atau komponen inti dari sebuah daerah, yaitu sumber daya manusia, kapasitas keuangan daerah, dan sumber daya pemerintah daerah;
- b. Infrastruktur, atau komponen sarana dan prasarana fisik daerah yang terdiri dari infrastruktur sosial, infrastruktur digital, dan infrastruktur fisik lainnya;
- c. Suprastruktur, atau komponen kelembagaan dan non-fisik yang terdapat di daerah seperti lembaga sosial dan pemerintahan, regulasi dan kebijakan, dan hubungan antar-lembaga.

Untuk melakukan analisis di dalam kesiapan smart city daerah, perangkat analisis yang dapat digunakan adalah analisis kesiapan berdasarkan nilai atau kondisi dan interpretasi-nya seperti atau kondisi tersebut dituliskan pada kolom interpretasi dengan menggunakan tanda checklist dibawah hasil pemaknaan dari nilai atau kondisi berdasarkan tingkat Baik, Sedang atau Buruk.

#### **2.1 Analisis Struktur Kota Probolinggo**

Analisis struktur daerah dilakukan untuk mengetahui kondisi dari unsur utama yang menjadi penggerak dalam pembangunan sebuah daerah. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Analisis kualitas sumber daya manusia
- b. Analisis Sumber Daya Pemerintahan
- c. Kapasitas Keuangan Daerah

##### **2.1.1 Analisis Sumber Daya Manusia**

Analisis kualitas sumber daya manusia daerah dilakukan untuk mengukur tingkat kapasitas masyarakat di daerah dalam menerima konsep *smart city*. Beberapa informasi yang perlu diketahui di dalam analisis ini adalah tingkat literasi masyarakat terhadap *smart city* yang nanti akan sangat membutuhkan partisipasi aktif dan positif dari masyarakat di daerah. Oleh karena itu, di dalam analisis ini diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan pengukuran terhadap kondisi masyarakat di daerah dalam menghadapi era *smart city* di masa depan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai oleh semakin meningkatnya capaian indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dilihat dari tiga bidang utama, yakni pendidikan,

kesehatan dan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia Kota Probolinggo menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya (2012-2016). Di samping itu, IPM Kota Probolinggo berada di atas rata-rata IPM Propinsi Jawa Timur. Peningkatan ini tidak terlepas dari hasil kerja keras unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Dengan IPM Kota Probolinggo mengalami trend positif hal ini dapat menjadi indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Probolinggo dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. IPM Kota Probolinggo tahun 2012-2016 disajikan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2012-2016 (Metode Baru)**



Berikut ini disajikan kontribusi indikator-indikator dari pencapaian IPM hingga tahun 2016 sebagai berikut :

**Tabel 20 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Probolinggo Tahun 2010-2016**

Komponen IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
AHH	69.35	69.41	69.46	69.50	69.52	69.72	69.79
Indeks Kesehatan	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.77
EYS	11.91	12.91	12.42	12.97	13.29	13.32	13.54
MYS	8.17	8.17	8.17	8.42	8.44	8.46	8.47
Indeks Pendidikan	0.60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.65	0.66

Sumber : Kota Probolinggo Dalam Angka, 2018

Berbagai program telah dilaksanakan guna dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Probolinggo yang ditandaidengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan taraf pendidikan penduduk yang meningkat secara bertahap.

### 2.1.2 Analisis Sumber Daya Pemerintahan

Analisis terhadap sumber daya pemerintahan dilakukan untuk mengukur tingkat kesiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan program smart city dimana di dalamnya dituntut adanya integrasi dan interoperabilitas di dalam proses bisnis pemerintah daerah. Disamping itu, sebagai unsur yang menjadi penggerak dari smart city, kesiapan pemerintah daerah di dalam melaksanakan smart city merupakan faktor kunci keberhasilan smart city. Sehingga di dalam analisis terdapat lebih banyak butir-butir informasi yang perlu ditelaah lebih lanjut di dalam analisis kesiapan pemerintah daerah.

**Tabel 21 Data PNS Daerah Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 2018**

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PENDIDIKAN								TOTAL
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	
1	Sekretariat Daerah	4	6	60	0	0	11	29	28	138
2	Sekretariat DPRD	0	1	15	1	0	2	12	4	35
3	Inspektorat	0	0	8	0	0	1	17	5	31
4	Bappeda dan Litbang	0	0	10	0	0	3	14	16	43
5	BPPKAD	0	2	26	0	0	12	16	19	75
6	BKPSDM	1	3	12	0	0	3	10	9	38
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	11	0	0	1	7	4	24
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	32	213	10	114	13	891	113	1393
9	Dinas Kesehatan	4	3	52	1	0	145	59	5	269
10	RSUD dr. Mohammad Saleh	4	6	72	0	0	231	61	27	401
11	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1	6	27	0	0	4	6	12	56
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	0	9	0	0	3	8	5	25
13	Dinas Sosial	0	1	17	0	0	2	8	6	34
14	Dinas Tenaga Kerja	0	0	12	0	0	3	16	6	37
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	1	0	16	0	0	0	13	9	39
16	Dinas Lingkungan Hidup	20	21	57	0	0	7	14	13	132
17	Dinas Kependudukan dan Capil	0	0	8	1	0	5	4	7	25
18	Dinas Perhubungan	0	2	25	0	4	6	6	8	51
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	7	0	0	8	10	15	41
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	6	7	33	0	0	6	17	10	79
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	0	12	0	0	4	7	12	36
22	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2	0	11	0	0	4	8	9	34

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PENDIDIKAN								TOTAL
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	0	13	0	0	4	7	9	33
24	Dinas Perikanan	1	2	16	0	0	1	11	7	38
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	0	11	0	0	2	24	14	52
26	Satuan Polisi Pamong Praja	3	5	35	0	0	1	11	6	61
27	Kecamatan Kademangan	5	3	30	0	0	2	29	2	71
28	Kecamatan Kanigaran	2	4	34	0	0	2	23	11	76
29	Kecamatan Kedopok	2	4	36	0	0	2	23	6	73
30	Kecamatan Mayangan	1	3	24	0	1	2	18	9	58
31	Kecamatan Wonoasih	2	2	35	0	1	0	22	6	68
32	BPBD	0	0	13	0	0	1	1	5	20
33	Sekretariat KPU	0	0	6	0	0	0	1	1	8
<b>TOTAL</b>		<b>68</b>	<b>115</b>	<b>966</b>	<b>13</b>	<b>120</b>	<b>491</b>	<b>1403</b>	<b>418</b>	<b>3594</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo, 2018

Dalam rangka mendukung smart city, maka diperlukan kecukupan SDM Aparatur dengan latar belakang pendidikan TIK.

**Tabel 22 Data Pegawai Berlatar Belakang Pendidikan TIK**

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	JENIS JABATAN				TOTAL	KET
		Struk	JFU	JFT	Non PNS		
1	Sekretariat Daerah	2		4	5	11	Prakom
2	Sekretariat DPRD	1	1		1	3	
3	Inspektorat			1		1	Prakom
4	Bappeda dan Litbang	1	1	3	1	6	Prakom, Arsiparis (1)
5	BPPKAD	1	1	5	7	14	Prakom, Analisis keuangan (1)
6	BKPSDM	2	2	3	1	8	Prakom
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1			1	
8	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		7	13	1	21	Guru (19), TU, Sekolah, Prakom
9	Dinas Kesehatan		1	3		4	Prakom
10	RSUD dr. Mohammad Saleh	1	1			2	Perekam Medis (1)
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1		1	1	3	Prakom
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				1	1	
13	Dinas Sosial	1		1		2	Prakom

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	JENIS JABATAN				TOTAL	KET
		Struk	JFU	JFT	Non PNS		
14	Dinas Tenaga Kerja			2	1	3	Instruktur (2)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB				1	1	
16	Dinas Lingkungan Hidup			1	1	2	Prakom
17	Dinas Kependudukan dan Capil		2	2	1	5	Prakom
18	Dinas Perhubungan			2	1	3	Prakom
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	4	0	5	3	12	Prakom
20	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	1		2	1	4	Prakom
21	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			2	1	3	Prakom
22	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	2	1			3	
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					0	
24	Dinas Perikanan			1	1	2	Prakom
25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			1	1	2	Prakom
26	Satuan Polisi Pamong Praja				1	1	
27	Kecamatan Kademangan				1	1	
28	Kecamatan Kanigaran	1		1	1	3	Prakom
29	Kecamatan Kedopok	1			1	2	
30	Kecamatan Mayangan	1				1	
31	Kecamatan Wonoasih	1			1	2	
32	BPBD				1	1	
33	Sekretariat KPU					0	
<b>TOTAL</b>		<b>21</b>	<b>19</b>	<b>52</b>	<b>36</b>	<b>128</b>	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo, 2018

### 2.1.3 Analisis Keuangan Daerah

Analisis terhadap kapasitas keuangan daerah diperlukan untuk mengetahui seberapa besar sumber daya yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mensukseskan pelaksanaan smart city. Melalui analisis ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperkirakan alokasi sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan dan keuangan yang dapat dialokasikan untuk program smart city. Disamping itu melalui analisis ini, pemerintah daerah juga didorong untuk dapat mulai mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif atau sumber pembiayaan pihak ketiga lainnya sebagai sumber daya dalam hal keuangan untuk menjalankan program smart city.



Realisasi APBD Kota Probolinggo tahun 2017 pada sisi Pendapatan Daerah berjumlah Rp. 910.819.469.658,04 melampaui sebesar Rp. 6.694.285.054,38 dari target/anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 904.125.184.603,66 dan mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.633.049.261,52 (2,78%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 berjumlah Rp. 886.186.420.396,52.

Realisasi Pendapatan tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 disebabkan terjadi kenaikan pada Pendapatan asli daerah, yaitu sebesar Rp. 171.307.335.436,52 pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp. 203.905.251.918,04 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 sedangkan realisasi Dana Perimbangan mengalami penurunan.

Seperti pada periode sebelumnya, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 masih didominasi oleh transfer fiskal dari Pemerintah Pusat seperti pada Grafik 3.02 berikut.

**Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah**

NO.	URAIAN	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAMBAH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 ( 4 - 3 )	6 ( 5 : 3 )
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
	- Target (Rp)	149.643.487.460,00	183.605.221.900,66	33.961.734.440,66	122,70%
	- Realisasi (Rp)	171.307.335.436,52	203.905.251.918,04	32.597.916.481,52	119,03%
	- Capaian (%)	114,48%	111,06%		
2.	<b>Dana Perimbangan</b>				
	- Target (Rp)	649.218.708.988,00	654.119.867.000,00	4.901.158.012,00	100,75%
	- Realisasi (Rp)	678.661.726.960,00	624.680.854.085,00	-53.980.872.875,00	92,05%
	- Capaian (%)	104,54%	95,50%		
3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>				
	- Target (Rp)	35.760.241.000,00	66.400.095.703,00	30.639.854.703,00	185,68%
	- Realisasi (Rp)	36.217.358.000,00	82.233.363.655,00	46.016.005.655,00	227,06%
	- Capaian (%)	101,28%	123,85%		
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>					
	<b>Target (Rp)</b>	834.622.437.448,00	904.125.184.603,66	69.502.747.155,66	108,33%
	<b>Realisasi (Rp)</b>	886.186.420.396,52	910.819.469.658,04	24.633.049.261,52	102,78%
	<b>Capaian (%)</b>	106,18%	100,74%		

Sumber Data : BPPKAD Kota Probolinggo (unaudited)

Pemerintah Kota Probolinggo memberikan perhatian yang baik terhadap pengembangan teknologi informasi. Hal itu terbukti anggaran pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo pada tahun anggaran 2017 mencapai jumlah 14 milyar rupiah atau sebesar 3,41% dari total belanja modal dan barang/jasa. Dana sebesar itu dipergunakan untuk belanja internet dan belanja infrastruktur teknologi informasi. Rincian belanja teknologi informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 24 Total Belanja TI Pemerintah Kota Probolinggo**

No	Jenis Belanja	Total Belanja
1	Belanja Internet	Rp. 1.590.556.000,-
2	Belanja Infrastruktur TI	Rp. 13.222.408.000,-
	<b>Total Belanja TI</b>	<b>Rp. 14.812.964.000,-</b>

Pada tahun anggaran 2017 Pemerintah Kota Probolinggo mengalokasikan anggaran untuk belanja modal dan barang/jasa sebesar Rp. 434.788.976.509,28. Dengan demikian total belanja teknologi informasi mencapai 3.41% dari total belanja modal dan barang/jasa. Hal ini memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo sangat peduli dengan pengembangan teknologi informasi.

## 2.2 Analisis Infrastruktur Kota Probolinggo

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur daerah dilakukan untuk mengukur kesiapan kondisi infrastruktur daerah yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, yaitu :

- a. Infrastruktur Fisik;
- b. Infrastruktur Digital;
- c. Infrastruktur Sosial;

### 2.2.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur fisik daerah dilakukan untuk mengukur kondisi sarana dan prasana fisik daerah yang menjadi titik tolak dalam pembangunan smart city daerah. Dengan mengetahui posisi saat ini dalam hal infrastruktur fisik, maka pemerintah daerah akan dapat mengukur seberapa banyak pembangunan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk mencapai visi smart city daerah.

Berikut adalah tabel capaian indeks infrastruktur fisik di Kota Probolinggo.

**Tabel 25 Capaian Indeks Infrastruktur Kota Probolinggo**

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
Jaringan Jalan	Kondisi jalan	Prosentase kondisi jalan (baik, sedang)	63,58	65,82	65,82	95,94	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Fasilitas pelengkap jalan	Prosentase panjang jalan dengan fasilitas perlengkapan jalan	34,17	34,03	40,70	67,18	Dinas Perhubungan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
	Prasarana transportasi	Prosentase jumlah prasarana transportasi (terminal, halte/shelter, pengujian kendaraan bermotor, jembatan timbang)	84,62	88,46	92,31	96,15	Dinas Perhubungan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Tingkat konektivitas	Prosentase konektivitas jalan	89,00	89,00	89,00	89,00	Dinas Perhubungan	Al Dami
<b>Kondisi Jalan (%)</b>			<b>67,84</b>	<b>69,33</b>	<b>71,96</b>	<b>87,07</b>		
Angkutan Umum	Angkutan Umum (cakupan layanan angkutan umum)	Prosentase Ruas Jalan yang dilalui angkutan umum	54,59	54,59	54,59	54,59	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Jumlah ijin trayek	Prosentase perpanjangan ijin trayek	88,37	87,75	92,65	86,27	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
<b>Angkutan Umum (%)</b>			<b>71,48</b>	<b>71,17</b>	<b>73,62</b>	<b>70,43</b>		
Air Bersih	Tingkat pelayanan air bersih	Prosentase RT atau terlayani Air Bersih (perpipaan PDAM)	43,85	49,01	47,33	57,90	PDAM	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
		Prosentase Penduduk dengan akses air bersih aman	87,38	91,04	96,07	98,04	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
<b>Air Bersih(%)</b>			<b>65.62</b>	<b>70.03</b>	<b>71.70</b>	<b>77.97</b>		
Limbah	Tingkat pelayanan air limbah	Prosentase penduduk yang terlayani tangki septik, MCK komunal, SPAL terpusat	74,53	78,24	85,23	85,93	Dinas Kesehatan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
	Tingkat pelayanan jaringan persampahan	Prosentase sampah masuk TPA	25,80	26,69	29,18	33,95	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
		Prosentase penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah	72,19	73,31	70,82	62,93	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
		Prosentase Pengoperasian TPA	68,00	68,00	70,00	72,00	Dinas Lingkungan Hidup	
<b>Limbah (%)</b>			<b>60,13</b>	<b>61,56</b>	<b>63,81</b>	<b>63,70</b>		
Irigasi dan drainase	Tingkat pelayanan irigasi	Persentase saluran irigasi, sungai, drainase dalam kondisi mantap	80,77	80,77	83,08	85,39	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
		Prosentase luas tanam irigasi teknis	49,03	51,06	53,06	55,10	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
		Prosentase Luas daerah rawan genangan	41,99	41,99	41,99	33,23	BPBD	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
<b>Irigasi dan Drainase (%)</b>			<b>57,27</b>	<b>57,94</b>	<b>59,38</b>	<b>60,83</b>		

Sumber : Kajian Indeks Infrastruktur, 2018

## 2.2.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah

Analisis terhadap kesiapan infrastruktur digital daerah diperlukan untuk mengukur kesiapan daerah dalam melaksanakan program smart city, mengingat di dalam konsep smart city, teknologi merupakan enabler yang dapat memberikan percepatan terhadap hasil capaian dari smart city. Berikut ini beberapa capaian infrastruktur digital Kota Probolinggo.

**Tabel 26 Capaian Infrastruktur Digital Kota Probolinggo**

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
Komunikasi dan informasi	Tingkat jaringan informasi dan komunikasi	Prosentase jumlah BTS berijin	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informasi	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
<b>Komunikasi dan Informasi (%)</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		

Adapun Infrastruktur TIK yang dimiliki kota Probolinggo antara lain:

- Bandwidth 110 Mbps dedicated dan 1,5 Mbps backup;
- Jaringan LAN/WAN Highspeed Wireless, mencakup area 29 kelurahan dan 39 OPD;
- Data Center;
- Probolinggo Command Center;
- Banger Telecenter dengan akses wifi-id up to 100 Mbps;
- Hotspot internal masing-masing OPD dan 12 titik hotspot akses publik;
- Cyber Park;
- Suroyo Super Koridor;
- Kampung Cyber.

Selain itu, ada juga Suroyo Super Koridor adalah Program Penyediaan Akses internet gratis di sepanjang Jalan Suroyo bagi warga Probolinggo dan UKM. Sampai tahun 2018, Pemerintah Kota Probolinggo telah mengimplementasikan 101 software aplikasi. Nama software aplikasi yang sudah diimplementasikan terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 27 Data aplikasi yang sudah diimplementasikan di Kota Probolinggo**

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
1	Aplikasi Manajemen Surat	Menginput data surat masuk dan surat keluar
2	SIMRAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengkajian dan peyusunan kebijakan nasional dibidang pengkajian dan penerapan teknologi</li> <li>• Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPPT</li> <li>• Pemantauan, pembinaan dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintahan dan swasta dibidang pengkajian dan penerapan teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan pengembangan kapasitas serta membina alih teknologi</li> <li>• Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga</li> </ul>
3	SMEP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem informasi untuk Monitoring dan Evaluasi hasil Pembangunan (realisasi fisik dan keuangan)</li> </ul>
4	Quantum GIS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan Data Spasial (Peta) dan Atributnya</li> </ul>
5	SIMDA BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui aset barang milik daerah</li> </ul>
6	SIM Gaji PNS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk informasi Gaji PNS</li> </ul>
7	SIM Persediaan Barang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mengetahui ketersediaan persediaan barang daerah (atk, alat kebersihan, cetak, materai)</li> </ul>
8	SI ALAY (Bagian Adm Pembangunan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya sistem dokumentasi berkas paket pengadaan beserta surat-menyurat</li> </ul>

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
9	AMA (Aplikasi Management Arsip)	• Untuk penyimpanan file arsip bagian humas dan protokol
10	SIMAYA	• Untuk penginputan surat masuk, dan surat keluar
11	SIRUP	• Untuk Penginputan Pengadaan Barang pada Bagian Humas dan Protokol
12	SIM KESRA	• Memberikan informasi data yang dibutuhkan dalam bidang kesejahteraan masyarakat
13	Aplikasi Anjab	• Untuk melakukan analisis jabatan tiap OPD diseluruh Kota Probolinggo
14	SAKIP	• Penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
15	Web Bagian Umum	• Sebagai Saluran Informasi Bagian Umum kepada masyarakat
16	Si JinGGo (Sistem Jaringan Informasi Good Governance)	• Pelaporan dan Pusat Data tentang Monografi Kelurahan, Evaluasi Perkembangan Kelurahan, dan Laporan Kependudukan
17	Sistem Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	• Sebagai aplikasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan
18	Sistem Informasi Manajemen Evaluasi Pembangunan	• Sebagai evaluasi hasil pembangunan
19	Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah	• Aplikasi memuat data- data statistik daerah
20	SIMKASDA	• Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
21	APLIKASI PAJAK DTH RTH	• Rekapitulasi Transaksi Harian dan Daftar Transaksi Harian
22	SISMIOP	• Sistem Administrasi pembayaran pajak pbb-p2
23	MAPINFO	-
24	SMARTMAP	• Berkaitan dengan pengelolaan peta sismiop dan sistem informasi geografis
25	PERDIN	-
26	HIBAH BANSOS	-
27	Website BPPKAD	-
28	SIMPADA (Pajak Daerah) milik BPPKAD	Sistem Informasi Pajak Daerah
29	Cell Plan	Pengajuan Lokasi Pembangunan Menara Seluler
30	SIMPUSTRONIK Puskesmas	Perekaman pelayanan di puskesmas (UKP)
31	SISKIA	Catatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas di seluruh fasyankes yang melayani
32	SIDEKA Pro	Pelaporan data kesehatan dari klinik dan rumah sakit
33	SIP	Pelaporan capaian data kesehatan untuk diluar gedung puskesmas (UKM)
34	SARAPATI (Kominfo)	Surat Menyurat
35	SIPADU	Pelayanan Perizinan
36	DAPODIK	Data Pokok Pendidikan
37	Laporan Individu	Laporan Kondisi Sekolah

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
38	VERVAL PTK	Memperbarui Data Pendidik
39	SIM Tunjangan	Manajemen Tunjangan Profesi Guru
40	E-Gotik	Data Kepegawaian / ASN
41	SIM PMP	Mengetahui Ketercapaian Mutu Pendidikan
42	SIM BIOUN SD & SMP	Mendata Peserta UN SD & SMP
43	SIM PIP	Mendata Siswa Miskin Berprestasi
44	SIM Akreditasi	Mendata Akreditasi Sekolah
45	SIM BIOUN PAKET A B C	Mendata Peserta UN Paket A B C
46	DAPODIK MASIF	Data Pokok Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Inklusif
47	Satu Data KKP	Data produksi perikanan secara nasional
48	INLIS LITE	Penyelenggaraan layanan perpustakaan mulai dari pengolahan bahan pustaka, pendaftaran anggota perpustakaan, peminjaman, sampai dengan pengembalian buku
49	Aplikasi Pemantau CCTV	Live streaming CCTV pada kota Probolinggo
50	SIM PKB (Penguji Kendaraan Bermotor)	Pengujian kendaan bermotor lebih cepat dan akurat serta mecegah human error
51	Sisko TLKN	Rekom/Mutasi paspor calon TKI
52	Aplikasi AKI	Kartu AKI / Kuning
53	BKOL	Bursa kerja online
54	KIOS 3IN1	Pelatihan , Sertifikasi
55	E-Formasi	Mengupate data kebutuhan pegawai
56	PUPNS	Mengupdate data pribadi PNS
57	SIP2DK	Mengupdate data ketenagakerjaan
58	Aplikasi Pendataan E-TLH	Mendata E-TLH
59	SIMLUHTANI	Entry data-data kelompok petani dan gapoktan se-kota probolinggo
60	E-proposal Kementerian Pertanian	Pengajuan Anggaran APBN di Kementerian Pertanian
61	SIPD	Sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien.
62	Software Jembatan Timbang	Menghitung dan Mencatat Berat Kendaraan Masuk TPA
63	Aplikasi Fingerspot	Pencatatan absensi pegawai
64	SIAK	Untuk pencatatan administrasi kependudukan
65	SIMRAL e-Musrenbang	Entry data usulan hasil musrenbang baik di kelurahan maupun di kecamatan
66	Benroller	Perakaman E-KTP
67	BCardMGMT	Untuk pencarian biometric dan aktivasi e-KTP
68	SIPATEN	Untuk menerbitkan surat keterangan
69	LPSE Kota Probolinggo (lpse.probolinggokota.go.id/eproc4)	Upload rencana umum pengadaan dan proses pengadaan barang/jasa/lelang
70	SITI KENCANA	Sistem Informasi Keluarga Berencana Kota Probolinggo

No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
71	Website Portal Kota Probolinggo (portal.probolinggokota.go.id/)	Sebagai Layanan Informasi Website Kota Probolinggo
72	Website bag-organisasi.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian organisasi Kota Probolinggo
73	Website perekonomian.probolinggokota.go.id	Website Sekretariat Bagian Administrasi Perekonomian Kota Probolinggo
74	Website bag-pemerintahan.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian pemerintahan Kota Probolinggo
75	Website bag-hukum.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian Hukum Kota Probolinggo
76	Website bag-kesra.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Probolinggo
77	Website humasprotokol.probolinggokota.go.id/	Website Sekretariat Humasprotokol Kota Probolinggo
78	Website bag-pembangunan.probolinggokota.go.id/web	Website Sekretariat Administrasi Pembangunan Kota Probolinggo
79	Website bappedalitbang.probolinggokota.go.id/	Website Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Probolinggo
80	Website bkpsdm.probolinggokota.go.id/	Website Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo
81	Website bpbd.probolinggokota.go.id/	Website Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
82	Website bakesbangpol.probolinggokota.go.id/	Website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo
83	Website https://dinsos.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Sosial Kota Probolinggo
84	Website dpu.probolinggokota.go.id/web/	Website Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
85	Website dispenduk.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Kependudukan dan Capil Kota Probolinggo
86	Website dikpora.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
87	Website disnaker.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
88	Website dkupp.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo
89	Website dkp.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Perikanan Kota Probolinggo
90	Website dinkes.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
91	Website disbudpar.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo
92	Website dishub.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
93	Website disperta.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
94	Website diskominfo.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Komunikasi & Informatika Kota Probolinggo
95	Website blh.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo



No	Nama Software Aplikasi	Fungsi Software Aplikasi
96	Website dpmpstsp.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo
97	Website perpustakaan.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
98	Website dppakb.probolinggokota.go.id/	Website Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana Kota Probolinggo
99	Website inspektorat.probolinggokota.go.id/	Website Inspektorat Kota Probolinggo
100	Website satpolpp.probolinggokota.go.id/	Website Satpol PP Kota Probolinggo
101	Website dprd.probolinggokota.go.id/	Website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo

### 2.2.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah

Analisis kesiapan infrastruktur sosial di daerah dilakukan untuk mengukur kondisi kesiapan infrastruktur di daerah yang terkait dengan kewargaan. Kebutuhan akan sarana prasarana sosial merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan partisipasi dan keguyuban warga kota disaat smart city akan dan mulai melaksanakan.

Berikut ini beberapa capaian infrastruktur sosial di Kota Probolinggo :

**Tabel 28 Data Capaian Infrastruktur Sosial di Kota Probolinggo**

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
Fasilitas Publik	Tingkat pelayanan RTH	Prosentase luasan RTH publik yang tersedia	4.78	4.78	7.34	7,35	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
	Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Prosentase layanan posyandu	99,5	99,5	100	100	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan apotik eksisting	80	80	83,33	90	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan puskesmas eksisting	75	75	75	75	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan Dokter (umum+spesialis)	300	300	300	300	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan TT Rumah Sakit/jumlah penduduk	150,44	148,47	147,19	140,50	Dinas Kesehatan	SNI 03-1733-2004

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
	Tingkat pelayanan fasilitas umum penunjang perekonomian	Prosentase layanan fasilitas perekonomian (pasar) yang dilengkapi fasilitas kamar mandi, WC, sarana persampahan, kebakaran, ruang parkir, aman, terdapat bedak permanen, dengan sekat tembok dan penutup bedak, fasilitas pos jaga satpam	54.55	54.55	54.55	54.55	DKUPP	Permen PU No 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya dan SNI 03-1733-2004
		Prosentase layanan koperasi berijin	100	100	100	100	DKUPP	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
		Prosentase layanan bedak yang dihuni	92.86	92.86	92.86	92.86	DKUPP	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 01/PRT/M/2014
Tingkat pelayanan fasilitas pendidikan	Prosentase layanan SD	97.4	96.4	97.6	86.4	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Prosentase layanan SMP	84.7	85.9	87.2	87.1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Prosentase layanan SMA	86.8	85.9	87.2	87.1	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Ratio Murid SD/Kelas SD	88	81	81	84	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Ratio Murid SMP/KelasSMP	83	83	83	83	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	SNI 03-1733-2004	
	Ratio Murid SMA/Kelas SMA	86	75	81	81	Dinas Pendidikan,	SNI 03-1733-2004	

Variabel	Indikator	Metode Kuantifikasi	Capaian Indeks Infrastruktur				SKPD	Sumber
			2014	2015	2016	2017		
							Pemuda, dan Olahraga	
<b>Fasilitas Publik (%)</b>			<b>93.87</b>	<b>92.49</b>	<b>93.48</b>	<b>92.92</b>		
IMB	Penerbitan IMB	Prosentase IMB terbit	5,19	5,72	6,41	6,41	DPUPR	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 01/PRT/M/2014
<b>Indeks IMB (%)</b>			<b>5,19</b>	<b>5,72</b>	<b>6,41</b>	<b>6,41</b>		

Di Kota Probolinggo terdapat hanya satu perpustakaan daerah yang lokasinya menyatu dengan kantor Bidang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo, namun demikian setiap kelurahan mempunyai perpustakaan kelurahan dan demikian juga di setiap sekolah yang ada, taman baca di kantor kecamatan, di Puskesmas, Informasi dan Pendidikan Lingkungan Hidup (IPLH), Lembaga Pemasyarakatan dan Taman Posyandu. Di samping itu, ada layanan satu unit Mobil Perustakaan Keliling (MPK) yang secara berkala mengunjungi titik-titik baca. Pada tahun 2017 ini direncanakan ada 130 lokasi yang dikunjungi oleh MPK diantaranya 38 Taman Kanak Kanak, 29 Kelurahan, 50 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan 13 di sudut baca lainnya.

### 2.3 Analisis Suprastruktur Kota Probolinggo

Suprastruktur atau aspek kelembagaan dan kebijakan di daerah merupakan suatu perangkat yang akan menjamin lancar tidak pelaksanaan smart city, khususnya smart city yang dimulai dan didorong dari inisiatif pemerintah daerah seperti yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi suprastruktur atau kebijakan dan kelembagaan dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu :

- a. Kesiapan Kebijakan Daerah
- b. Kesiapan Kelembagaan Daerah
- c. Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

#### 2.3.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Aspek kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif smart city yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin

pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Untuk itu, analisis terhadap aspek kebijakan di daerah perlu dilakukan.

Kebijakan merupakan salah satu aspek yang diperlukan bagi pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program pembangunan. Begitu pun dengan inisiatif *smart city* yang dilaksanakan di daerah, memerlukan seperangkat kebijakan untuk menjamin pelaksanaannya berjalan dengan baik, lancar dan berkelanjutan. Berikut ini kesiapan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo :

**a. Peraturan Walikota**

1. Perwali 35/2010 tentang Masterplan e-Government Kota Probolinggo 2010-2029;
2. Perwali 17/2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
3. Perwali 18/2013 Tentang Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
4. Perwali 19/2013 Tentang Pendayagunaan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Probolinggo Dan Situs Web SKPD ;
5. Perwali 32/2015 Tentang Pengelolaan Sistem Administrasi Kelurahan (SIAKEL) Dil Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
6. Perwali 33/2015 Tentang Standar Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
7. Perwali 34/2017 Tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan;
8. Perwali 54/2017 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
9. Perwali 57/2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online;

**b. Keputusan**

1. SK No.29/2014 Tentang Tim Peningkatan e-Government Kelurahan; *(Diperbarui setiap tahun s/d Sekarang)*
2. SK No.33/2014 Tentang Pengelola Banger Telecenter Tahun 2014; *(Diperbarui setiap tahun s/d Sekarang)*
3. SK No.41/2015 Tentang Tim Chief Information Officer (CIO) Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2015; *(Diperbarui setiap tahun s/d Sekarang)*

**c. Edaran**

1. SE No. 555/1794/425.113/2013 tentang Penggunaan Alamat e-mail Resmi Pada Instansi Pemerintah Daerah;

2. SE No. 555/60/425.113/2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Melalui Media Website;
3. SE No. 555/2501/425.113/2013 tentang Panduan Standar Dan Content Website Resmi Instansi/SKPD;
4. SE No. 555/2363/425.113/2014 tentang penyelenggaraan SiMaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
5. SE No. 555/2221/425.113/2015 tentang Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kelurahan (SIAKEL) Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
6. SE No. 555/2363/425.113/2014 tentang penyelenggaraan SiMaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

### 2.3.2 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah

Kelembagaan daerah merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan smart city di daerah dari sisi pengelola kota, yaitu pemerintah daerah. Di dalam aspek kelembagaan ini, nantinya akan diatur pembagian peran dalam pelaksanaan smart city. Oleh karena itu, aspek kelembagaan menjadi salah satu bagian dari analisis kesiapan smart city di daerah.

Berdasarkan Keputusan Walikota Probolinggo Nomor: 188.45/361/KEP I425.AL2/2018 Tanggal 4 Juni 2018 telah dibentuk Dewan Smart City Kota Probolinggo. Tugas dari Dewan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Probolinggo Smart City melalui Master Plan Probolinggo Smart City berbasis RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Probolinggo Tahun 2015-2025 dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 ;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap implementasi Probolinggo Smart City; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada walikota Probolinggo.

Anggota Dewan Smart City Kota Probolinggo adalah sebagai berikut:

No	Tugas	Nama Jabatan / Instansi
1.	Pengarah	1. Walikota Probolinggo
		2. Ketua DPRD Kota Kota Probolinggo
2	Ketua Dewan	Wakil Walikota Probolinggo
3	Wakil Ketua 1	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
	Wakil Ketua II	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

No	Tugas	Nama Jabatan / Instansi
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
	Wakil Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
5	Anggota (Pakar dan Praktisi)	1. Direktur AMIK Taruna Probolinggo
6	Anggota (Pemkot Probolinggo)	2. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman
		5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
		6. Kepala Dinas Kesehatan
		7. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
		8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11. Kepala Dinas Perhubungan
		12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		13. Kepala Dinas Perikanan
		14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
		15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
		16. Kepala Bagian Pemerintahan
		17. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian
		18. Kepala Bagian Hukum
		19. Kepala Bagian Kerjasama dan Administrasi Wilayah
		20. Para Camat Se-Kota Probolinggo
		21. Para Lurah Se-Kota Probolinggo

Walikota Probolinggo juga telah membentuk Tim Teknis Dewan Smart City di Kota Probolinggo seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 188.45/362/KEP/425.012/2018.

- a. Menyusun Master Plan Probolinggo Smart City tahun 2019-2023;
- b. Menyusun dasar hukum implementasi Probolinggo smart city;
- c. Menganalisis kebutuhan sistem informasi, solusi, mendesain dan menyelaraskan sistem informasi pendukung Smart City di Kota Probolinggo;
- d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien;
- e. Mengembangkan sistem informasi sesuai kebutuhan serta mengintegrasikan sistem informasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- f. Menyediakan layanan Help Desk dan Transfer Knowledge; dan
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi serta membuat laporan.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Probolinggo.

<b>PELAKSANA</b>	
Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Wakil Ketua I	Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah pada BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo
Wakil Ketua II	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo
Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pembiayaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan pada BAPPEDA LITBANG Kota Probolinggo
<b>Tim Perencanaan dan Pengembangan Smart City</b>	
Koordinator	Kepala Seksi Penataan Ruang Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan Serta Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Probolinggo
Anggota	Kepala Seksi Perencanaan Pertanahan dan Kawasan Permukiman Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Pembangunan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Pcrmukiman Kota Probolinggo
	Kcpala Seksi Tata Kelola E-Govcrnmcnt Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Govcrnmcnt Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
<b>Tim Pengelola dan Pelaksanaan Smart City</b>	
Koordinator	Kepala Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Wakil Koordinator	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
Anggota	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan e-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
	Fitrianingsih, S.Kom
	Yoga Adetya, A.Md
	Ahmad Basyar
	Andre Junanto, A.Md
Yona Eka Yuliawan	

Dalam pelaksanaan program kerja Walikota Probolinggo, berbagai kegiatan dan kerja sama telah berhasil dilaksanakan dan beberapa penghargaan juga berhasil dicapai oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Beberapa kegiatan, kerjasama dan penghargaan yang telah diterima antara lain:

- Penghargaan KLA Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak [22 Juli 2017]
- Pengembangan Pariwisata Kota Probolinggo Berbasis Kearifan Lokal untuk Kembangkan Wisata Berkelanjutan [05 Januari 2017]
- Sekda Kota Probolinggo dr Bambang Agus Suwignyo (kiri) ketika menerima penghargaan kota sehat kali ke-3 sejak tahun 2013 [28 Nopember 2017]
- Pemerintah Kota Probolinggo kedatangan Working Group dari Helsingborg Swedia, sebagai tindak lanjut kerjasama SymbioCity [24 Oktober 2017]
- Peresmian Pelabuhan Tanjung Tembaga oleh Menteri Ignasius Jonan, merupakan satu-satunya pelabuhan yang dikelola pemerintah [24 Des 2015]
- Sekda Kota Probolinggo Johny Haryanto menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Utama yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya di Ruang Auditorium Sekretariat Wapres RI [31 Januari 2017]
- Wali Kota Rukmini saat menerima penghargaan TOP Leader on IT Leadership dari Mensesneg Pratikno di Balai Kartini, Jakarta [31 Okt 2017]
- Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo menyerahkan penghargaan "Innovative Government Award (IGA)" 2017 kepada Wali Kota Probolinggo di Jakarta [18 Desember 2017]

### **2.3.3 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah**

Disamping aspek kebijakan dan kelembagaan, terdapat satu aspek non-fisik selanjutnya yang akan menjadi penentu dari keberlanjutan *smart city* di daerah. Aspek tersebut adalah aspek organisasi di masyarakat sipil. Aspek ini menjadi salah satu aspek dalam kesiapan *smart city* karena di dalam sebuah *smart city*, aspek partisipasi masyarakat yang digerakkan di dalam organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu inti dari *smart city*. Di Kota Probolinggo terdapat beberapa perguruan tinggi, antara lain:

- STIA Bayuangga
- STAI Muhammadiyah
- STIKES Bhakti Bangsa



### BAB III

#### ANALISIS GAP

Analisis dengan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and threats*) dilakukan dengan tujuan untuk memetakan kondisi pengembangan dan penerapan e-government di Pemerintah Kota Probolinggo dengan meninjau berbagai faktor internal berupa kekuatan dan kelemahannya, serta faktor-faktor eksternal berupa peluang dan tantangan pada saat ini. Ada beberapa komponen pokok yang akan di analisis yaitu kelembagaan atau organisasi, hukum dan kebijakan, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur teknologi informasi yang mencakup perangkat keras serta jaringan komputer, dan sistem informasi yang mencakup basis data serta aplikasi komputer. Kelima komponen tersebut di analisis dari 4 (empat) sisi yaitu letak kekuatannya (*strengths*), titik kelemahannya (*weaknesses*), peluang yang tersedia (*opportunities*), dan tantangan atau ancaman yang ada (*threats*). Analisis swot ini digunakan sebagai dasar penentuan dalam penyusunan smart city bagi Pemerintah Kota Probolinggo.

Dari analisis ini maka dapat dilakukan evaluasi diri demi melakukan pembenahan diri dalam membangun smart city yang efektif, efisien, handal, transparan, dan akuntabilitas. Selain itu, dengan analisis SWOT tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah utama yang perlu mendapatkan perhatian untuk dapat mencapai kondisi yang memungkinkan untuk membangun dan mengembangkan smart city di Pemerintah Kota Probolinggo.

Analisis SWOT yang disusun berikut selain dari hasil kuisisioner juga hasil dari hasil dari survey dan wawancara langsung terhadap wakil-wakil dari instansi pemerintah dan masyarakat, serta hasil survey terhadap dokumen-dokumen pendukung (data-sekunder) yang terdapat di Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut adalah hasil dari penyusunan analisis swot terhadap komponen smart city di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo :

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen pimpinan</li> <li>- Sarana dan prasarana yang mendukung</li> <li>- Adanya produk hukum daerah yang mendukung iklim inovasi (Perwali Inovasi)</li> <li>- Desentralisasi kewenangan pimpinan dalam pembangunan</li> <li>- tersedianya sarana IT (internet, Komputer PC, Server)</li> <li>- Tersedianya peraturan atau regulasi tentang TIK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terintegrasinya system dan data</li> <li>- Ketersediaan anggaran untuk mewujudkan smart city belum memadai</li> <li>- Kepedulian masyarakat terhadap pembangunan kurang</li> <li>- SDM praktisi TIK masih belum merata dan dioptimalkan untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK</li> <li>- Belum adanya regulasi yang mengatur tentang integrasi data dan aplikasi</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya SOTK Organisasi yang mendukung implementasi smart city</li> <li>- Memiliki beberapa aplikasi e Government, yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo maupun OPD lain</li> <li>- Adanya fasilitas pembangunan system IT dari diskominfo</li> <li>- Adanya lembaga fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui TIK</li> <li>- Sudah tersedia akses jaringan internet ke seluruh OPD maupun kelurahan</li> <li>- SDM dan SDA yang memadai</li> <li>- Pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya tersedia Master Plan Pengembangan TIK Kota Probolinggo</li> <li>- Smart city belum dituangkan dalam RPJP dan RPJM Kota Probolinggo</li> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat</li> <li>- Belum sepenuhnya menggunakan jaringan Fiber Optic (FO)</li> <li>- Koordinasi OPD dengan Dinas Kominfo dalam pengembangan TIK belum optimal</li> <li>- Platform pengembangan TIK di masing-masing OPD yang beragam</li> </ul>
--	---

PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya institusi pendidikan yang mendukung program smart city baik secara jumlah dan kualitas</li> <li>- Peningkatan peran e-government dalam pembangunan kota</li> <li>- Adanya kerjasama dengan lembaga baik regional, nasional maupun internasional</li> <li>- Adanya forum kreatif dari pihak di luar pemerintahan</li> <li>- Tersedianya beragam media (sosial, cetak, elektronik)</li> <li>- Banyaknya SDM Kota Probolinggo yang mumpuni dalam menunjang smart city</li> <li>- Perguruan Tinggi memiliki program Pengabdian Masyarakat yang mendukung Smart City</li> <li>- Akses broadband sudah mencakup seluruh wilayah</li> <li>- Perkembangan TIK berbasis mobile</li> <li>- Banyaknya penyedia jaringan internet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya gangguan yang mengancam stabilitas ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan dan agama</li> <li>- Kemampuan hacker yang dapat menembus system keamanan data dan informasi</li> <li>- adanya gangguan system (virus)</li> <li>- adanya peluang penyalahgunaan hak akses oleh pegawai</li> <li>- Perkembangan teknologi informasi yang cepat, belum diimbangi dengan kecepatan pembaharuan kapasitas SDM</li> <li>- Meningkatnya jumlah urbanisasi yang tidak memiliki keahlian dan pendidikan yang cukup</li> </ul>

Untuk mengatasi tingkat ketimpangan antara tujuan masa depan yang ingin dicapai dengan kondisi saat ini yang dapat dilihat pada analisis kesiapan daerah, maka ada beberapa strategi yang perlu dirumuskan sebagai berikut :

### STRATEGI S - O

- Mendorong pimpinan yang peduli dengan e-Gov untuk meningkatkan peran TIK pada tata kelola pemerintahan
- Optimalisasi kewenangan SKPD Kominfo untuk melengkapi berbagai regulasi
- Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK yang berlaku untuk semua unit kerja
- Adanya kebijakan pengarah dari pimpinan daerah, serta alat kontrol dan monitoring untuk implementasi e-govt
- Pengembangan aplikasi pendukung pelayanan publik berbasis mobile system
- Replikasi pengembangan smart city dari daerah lain
- Kolaborasi antar pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha dan akademisi untuk pengembangan smart city
- Reposisi SDM TIK yang sesuai dengan kompetensi untuk mendukung Smart City

### STRATEGI S - T

- Penyusunan regulasi untuk akses dan pengamanan data
- Membentuk Tim Administrasi TIK yang solid
- Diseminasi informasi tentang smart city kepada seluruh stake holder
- Memperkuat hubungan kerjasama antar pimpinan lembaga dan instansi untuk memperkecil resiko ancaman

### STRATEGI W - O

- Mengoptimalkan seluruh potensi pemerintah dan akademisi untuk integrasi data dan system aplikasi
- Membuka peluang kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan smart city
- Memanfaat pers/media untuk mengedukasi masyarakat dan mensosialisasikan regulasi
- Koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain yang menjadi penyangga
- Meningkatkan koordinasi dalam pengembangan TIK antara OPD dengan Dinas Kominfo
- Distribusi SDM TIK yang lebih merata di seluruh OPD
- Membangun jaringan kabel Fiber Optic (FO) di seluruh instansi pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan intranet
- Memberikan panduan tentang penggunaan platform dalam pengembangan TIK

### STRATEGI W - T

- Meningkatkan kemampuan masyarakat dan kapasitas kelembagaan untuk menangkal ancaman
- Menyusun regulasi untuk integrasi antar system yang ada di pemerintahan
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan TIK secara aman dan sehat
- Menyusun Masterplan smart city
- Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan kota
- Membangun sistem pengamanan dan *backup* data yang kuat

Dari analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and threats*) tentang rencana implementasi smart city di Kota Probolinggo di atas, maka daya dukung Kota Probolinggo relatif cukup memadai untuk melaksanakan program smart city. Pada dasarnya, pengelolaan kota secara cerdas telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo melalui pengembangan program inovasi dan berkelanjutan. Daya dukung TIK juga telah dikembangkan sedemikian rupa untuk pengelolaan kota secara cerdas ini. Tentunya, pengembangan inovasi dan berkelanjutan dengan optimalisasi pemanfaatan TIK ditujukan untuk semakin memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan yang baik dan memberikan manfaat yang semakin luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

## BAB IV

### ANALISIS VISI PEMBANGUNAN SMART CITY

#### 4.1 Sasaran Smart City Daerah

Smart City Probolinggo bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Probolinggo dengan pengimplementasian teknologi informasi dan komunikasi. Adapun sasaran Smart City Probolinggo berdasarkan pilar smart city adalah :

##### 4.1.1 Smart Governance

**Sasaran :**

1. Mereformasi tata pemerintahan menjadi pelayanan publik bebas korupsi
2. Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, kolaboratif dan berkarifan lokal melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terintegrasi
4. Menciptakan sistem manajemen pengelolaan kota dengan mewujudkan tata pemerintahan daerah yang Inovatif, Komunikatif, dengan melakukan Improvement yang berkelanjutan dengan mengadopsi Teknologi yang Smart.

Adapun target dari smart governance ini adalah:

##### a. Pelayanan Publik (*Public Service*)

- 1) Pelayanan administrasi kepada masyarakat: meliputi status kewarganegaraan, status usaha, sertifikat kompetensi, kepemilikan, atau penguasaan atas barang. Wujud dari produk tersebut adalah dokumen - dokumen resmi seperti SIUP, ijin trayek, ijin usaha, akta, kartu tanda penduduk, dan lain sebagainya. (yang tergabung dalam SI PADU Online di DPMPTSP)
- 2) Peningkatan monitoring ketersediaan dan penyediaan kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat dengan membangun sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan (TPIID).
- 3) Peningkatan penyediaan sarana prasarana dan monitoring penyediaan kebutuhan jasa pokok bagi masyarakat misalnya jaringan telepon, listrik, internet, dan lain-lain.
- 4) Menghadirkan pelayanan public yang efektif, efisien, transparan dan terukur

- 5) Memudahkan masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan dokumen kependudukan dan menjadikan identitas kependudukan sebagai basis data dalam pelayanan publik
- 6) Adanya pelayanan kesehatan gratis
- 7) Adanya pelayanan pendidikan gratis
- 8) Adanya Pelayanan publik langsung ke rumah (Si LAJU) DPM PTSP
- 9) Adanya peningkatan pelayanan di kelurahan
- 10) Adanya pengembangan pelayanan publik terpadu di kecamatan
- 11) modernisasi pelayanan pajak dan distribusi
- 12) pengembangan akses internet pada ruang publik
- 13) Pelayanan administrasi berbasis on line dan berarifan lokal.
- 14) Aksesibilitas pelayanan oleh semua lapisan masyarakat termasuk berkebutuhan khusus (difabel).
- 15) Tersedia ruang terbuka hijau, ruang ramah anak dan ruang laktasi disetiap tempat pelayanan publik
- 16) Pelayanan publik yang efektif, efisien, proaktif, integratif dan transparan. Contoh: Pelayanan 3 G. Pelayanan Pemasangan Baru PDAM dll
- 17) Pengawasan dan pengamatan masyarakat melalui media sosial yang terkoneksi dengan unit layanan publik

b. Manajemen Birokrasi Yang Efisien (*Bureaucracy*)

- 1) Tata kelola birokrasi yang berorientasi pada keadilan (fairness), bertanggung-jawab (accountability) dan keterbukaan (transparency). Misalnya: sistem e-planning, e-budgeting, e-monev, e-tax dan lain-lain.
- 2) Pengembangan aplikasi e-gov harus diarahkan menuju integrated & interoperability e-gov atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antar satu aplikasi dengan aplikasi lainnya serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Gov. Pelayanan Smart e-Gov ini perlu didukung dengan sebuah "City Operation Center (COC)".
- 3) Birokrasi yang bersih, transparan, melayani dan berintegritas
- 4) Optimisasi TIK dalam pengelolaan manajemen birokrasi
- 5) Pelaksanaan dan pengawasan implementasi standar operasional pelayanan bagi setiap level birokrasi
- 6) peningkatan etos dan kinerja aparat RT/RW
- 7) penguatan badan usaha milik daerah

- 8) Birokrasi yang bersih, melayani dan berintegritas. Contoh: Tersedianya finger scan di semua SKPD se Kota Probolinggo, e-procurement
  - 9) Optimalisasi TIK dalam pengelolaan manajemen birokrasi. Contoh: Sistem informasi manajemen transportasi darat, monitoring kondisi kawasan
  - 10) Pengelolaan Anggaran Kota yang Kredible dan Transparan melalui sistim Online.
- c. Efisiensi Kebijakan Publik (*Public Policy*)
- 1) Pengambilan kebijakan publik dengan mengutamakan pada aspek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui mekanisme mendengarkan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan. (LAPOROREK)
  - 2) Sistem informasi kebijakan pemerintah (Perda dan Peraturan Kepala Daerah) yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. (JDIH) bag. Hukum
  - 3) Transparansi proses penyusunan kebijakan public
  - 4) Memanfaatkan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan analisa dalam penetapan dan pemilihan keputusan yang sesuai.
  - 5) Pemanfaatan hasil Musrenbang sebagai data dan informasi awal dalam perumusan kebijakan
  - 6) Kerjasama media dalam kebijakan publik. Contoh: Berita dan hasil kajian media menjadi bahan dalam analisis kebijakan publik
  - 7) Memudahkan masyarakat dalam memperoleh/mengakses layanan dokumen kependudukan
  - 8) Menyajikan data kependudukan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembanguna disemua bidang
  - 9) Menjadikan Nomor Induk Kependudukan sebagai dasar pemberian layanan oleh seluruh lembaga layanan publik.

#### **4.1.2 Smart Branding**

Konsep branding daerah difokuskan pada perwujudan jati diri karakteristik kota dalam rangka meningkatkan niai daerah yang dapat mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Probolinggo berusaha menimbulkan kesan positif yang dapat memicu pertumbuhan kota kea rah yang lebih baik. Dengan kata lain, Kota Probolinggo akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Smart branding dilakukan pada beberapa indikator :

- a. Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*)
  - 1) Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke tempat wisata gedung tua peninggalan jaman penjajahan yang memiliki kaitan sejarah dengan wisatawan mancanegara
  - 2) Mengidentifikasi potensi dan sejarah lokal guna pengembangan kepariwisataan yang mempertimbangkan keunikan, kekhasan, lokalitas dan keutuhan etika
  - 3) Membangun budaya yang ramah melalui sosialisasi dan pelatihan keramahtamahan (*hospitality training*) bagi para pelaku pariwisata
  - 4) Mengembangkan budaya pandalungan sebagai budaya percampuran berbagai latar belakang budaya.
  - 5) Menjadi daerah transit yang nyaman dan ramah bagi wisatawan khususnya wisatawan mancanegara dalam rangka mengunjungi daerah wisata internasional gunung Bromo
- b. Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*)
  - 1) Ekspose produk daerah melalui web [probolinggokota.go.id](http://probolinggokota.go.id) dan Probolinggo Single Window (PSW)
  - 2) Updating ekspose konten pariwisata Kota Probolinggo untuk jenis wisata kota pusaka, wisata hiburan, wisata kuliner, wisata kawasan pesisir dan mangrove, wisata cinderamata, wisata hotel, wisata melalui travel agent.
  - 3) Membangun dan mengembangkan produk ekonomi daerah berbasis digital dan mobile
  - 4) Menumbuhkan kelompok ekonomi kreatif dan mendorong tumbuhnya usaha start up
  - 5) Menggiatkan ekonomi melalui even-even tertentu seperti kegiatan Morning on Panglima Street (MPS), Semarak Pagi Kecamatan (SPK) di tiap-tiap kecamatan dan pasar Minggu.
- c. Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*)
  - 1) Mengukuhkan jatidiri Kota Probolinggo sebagai Kota Heritage (Kota Pusaka) yang memiliki bangunan-bangunan bernilai tinggi sejarah yang ditopang oleh arsitektur kota yang post-modern, kombinasi dari arsitektur modern yang dibalut oleh arsitektur klasik kolonial.
  - 2) Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Seribu Taman yang dapat menjadi sentra kegiatan masyarakat dan wisata taman yang ramah anak, ramah lansia dan ramah hobby.



- 3) Membangun dan mengembangkan sistem informasi destinasi wisata dan pusaka Kota Probolinggo berbasis teknologi multimedia dan berbasis mobile

#### 4.1.3 Smart Economy

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah Smart Economy atau tata kelola perekonomian yang pintar. Smart Economy dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi Smart Economy di dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*.

Ekonomi cerdas merupakan pendekatan pemecahan masalah ekonomi daerah dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien dengan mereduksi biaya operasional lebih minimal, lebih produktif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Tujuan Smart Economy ini adalah meningkatkan perekonomian dengan menguatkan peran dari sector industry, UMKM, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dan usaha jasa lainnya. Tujuan ini selaras dengan Agenda Prioritas Kota Probolinggo yaitu :

**Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui akselerasi pengembangan industri, perdagangan, UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata**

Sasaran :

- Menciptakan iklim perokonomian dengan peningkatan ekomomi kerakyatan melalui pemberdayaan badan usaha lorong dan UKM
- Menciptakan kondisi investasi yang kondusif.
- Pengurangan pengangguran
- Meningkatkan inovasi-inovasi untuk menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal
- Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini.
- Pelatihan keterampilan dan pemberian dana bergulir

Adapun target dari smart economy ini adalah:

- a. Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*Industry*).
  - 1) Membangun sistem perijinan yang terbuka, akuntabel, online dan terpadu (PTSP-Online)
  - 2) Mengembangkan ekonomi kreatif
  - 3) Memberikan pelatihan kewirausahaan berbasis e-commerce kepada para pelaku usaha.
  - 4) Membuat dan mengembangkan forum wirausaha
- b. Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*)
  - 1) Membangun sentra UMKM yang nantinya diintegrasikan dengan layanan digital
  - 2) Mengintegrasikan informasi peluang kerja dan peluang peningkatan kapasitas warga melalui layaan digital – kios 3 in 1 dan bursa kerja on line
  - 3) Revitalisasi pasar
- c. Membangun ekosistem transaksi keuangan (*Transaction*)
  - 1) Tersedianya kebijakan yang mendukung sistem transaksi keuangan digital
  - 2) Merancang dan mengembangkan sistem transaksi pembayaran non tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyerapan kegiatankegiatan yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan danbelanjadaerah (APBD).
  - 3) Mewujudkan masyarakat yang bankable dan memiliki akses terhadap permodalan.

#### 4.1.4 Smart Living

Terkait perwujudan smart living, salah kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 adalah Misi Pembangunan keempat, yaitu : mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota jasa yang ramah lingkungan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari misi tersebut yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah **(1) meningkatkan ketersediaan infrastruktur kota guna menunjang upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan pelayanan dasar, (2) meningkatkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan kota.**

Secara konseptual, smart living adalah lingkungan kota (yang diwujudkan dalam sistem perkotaan) yang nyaman untuk tinggal dan beraktivitas dengan melibatkan masyarakat serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun visi berkaitan dengan smart city adalah: ***Probolinggo Kompak dan Livable dengan dukungan Teknologi (KLIT)***, dan Misi :

- Mewujudkan kota kompak melalui harmonisasi antara perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Mewujudkan livable city dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai serta pelibatan aktif masyarakat.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna mewujudkan smart living.

Pembangunan Smart Living diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut:

a. Harmonisasi tata ruang wilayah (*Harmony*)

1) Sebagai komitmen Kota Probolinggo untuk mewujudkan kota hijau, pada tahun 2012 dengan fasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum dilakukan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Kota Probolinggo terlibat dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) sebagai salah satu langkah nyata Pemerintah Pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten dalam memenuhi ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, terutama terkait pemenuhan luasan RTH perkotaan, sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim di Indonesia. Beberapa hasil dari kegiatan P2KH adalah: Master Plan RTH, green map, serta pembangunan 3 taman (Maramis 1 dan 2 serta Semeru).

Sebagai jawaban tantangan global terkait perwujudan kota layak huni, pada tahun 2016 dilakukan kajian tingkat kelayakhunian Kota Probolinggo berdasar data kinerja pemerintah (obyektif) serta persepsi masyarakat (subyektif). Hasil dari kajian tersebut adalah:

- a) Livabilitas Kota Probolinggo secara subyektif berdasarkan persepsi masyarakat adalah sebesar 79,47. Variabel yang memiliki nilai terendah secara subyektif (berdasar persepsi masyarakat) adalah variabel ekonomi. Demikian pula secara obyektif (berdasar penilaian kinerja pemerintah) variabel ekonomi memiliki nilai terendah.
- b) Faktor kritis dan memerlukan prioritas penanganan adalah indikator-indikator dengan nilai livabilitas subyektif rendah, livabilitas obyektif rendah yang

meliputi: ketersediaan fasilitas pejalan kaki, ketersediaan angkutan umum, kepadatan bangunan, ketersediaan PDAM, kualitas RTH, keamanan terhadap bencana, tingkat pendapatan, pengentasan kemiskinan.

- c) Faktor-faktor demografis yang mempengaruhi livabilitas adalah: usia dan penghasilan. Namun demikian korelasi antara faktor-faktor tersebut dengan livabilitas cenderung lemah.
- 2) Lebih lanjut, sebagai komitmen mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak huni, pada Tahun 2017 dilakukan FGD (Focus Group Discussion) “Mewujudkan Kota Probolinggo sebagai Kota Layak Huni” yang melibatkan unsur pemerintah serta masyarakat. Beberapa kesepakatan dalam FGD adalah:
- a) Guna mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak huni diperlukan kolaborasi antara semua stakeholder kota. Kenyamanan hidup berkota adalah hak setiap warga kota, oleh karena itu Pemerintah sebagai pihak yang diberi mandat oleh warga harus berusaha untuk merencanakan, membangun dan mengendalikan kawasan perkotaan demi terciptanya lingkungan perkotaan yang nyaman untuk dihuni. Di sisi lain, warga juga harus paham dan menjalankan kewajiban sebagai warga kota yang turut serta mewujudkan kenyamanan kota.
  - b) Bahwa kota layak huni merupakan sebuah bentuk warisan bagi anak cucu.
  - c) Beberapa usulan strategi mewujudkan Kota Probolinggo sebagai kota layak huni adalah:
    - Aspek sosial budaya: perlu mengakomodasi upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam visi dan misi kepala daerah serta pengalokasian anggaran yang memadai pada sektor kesehatan masyarakat.
    - Aspek ekonomi: perlu pengembangan investasi melalui promosi dan perbaikan iklim investasi sehingga diharapkan terjadi multiplier effect berupa penyerapan tenaga kerja dan terbukanya peluang usaha baru sehingga dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
    - Aspek fisik: perlu peningkatan infrastruktur transportasi berupa: peningkatan jaringan jalan, penyediaan pedestrian serta peningkatan ketersediaan dan kualitas angkutan umum.
- 3) Pembangunan taman cyber

- 4) Penyediaan Sistem Informasi Terpadu (big data) Berbasis Data Spasial
- 5) Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh
- 6) Perluasan Jaringan PDAM
- 7) Pengembangan Kota Kompak Berbasis TOD
- 8) Pengembangan Kampung Tematik Berbasis Partisipasi
- 9) Pembangunan Pilot Project Smart Building
- 10) Penyediaan Hunian Murah

b. Mewujudkan prasarana kesehatan (*Health*)

- 1) 7,2% ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh Kota Probolinggo tidak hanya berfungsi sebagai sarana cadangan oksigen diperkotaan, beberapa ruang terbuka hijau dikota Probolinggo seperti taman manula, taman maramis, RTH Kedopok, Alun-alun RTH-IPLH dapat digunakan sebagai sarana rekreasi, sarana peningkatan ekonomi masyarakat Kota Probolinggo, dan sarana aktivitas sosial dan berinteraksi mulai dari anak anak, remaja, dewasa hingga manula.
- 2) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Sejak tahun 2012 Kota Probolinggo telah mempunyai Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok serta Peraturan Walikota Probolinggo nomor 40 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Terbatas Merokok. Hal ini disebabkan, kebiasaan merokok di Kota Probolinggo telah merambah hingga kalangan anak dan remaja akibat dari gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Berdasarkan Perda No.12 Tahun 2009, ada 5 kawasan yang ditetapkan Kawasan Tanpa Merokok (KTR), yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah dan tempat lainnya yang ditetapkan. Sedangkan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) terdapat 3 kawasan yakni tempat kerja, tempat umum dan angkutan umum. Penerapan KTR dan KTM di Kota Probolinggo masih relatif belum ideal. dilihat dari hasil kegiatan tipiring, monitoring, dan sidak KTR dan KTM pada Mei 2010 s.d. Desember 2017 menunjukkan masih banyaknya pelanggaran dilakukan.
- 3) Dinas Kesehatan Kota Probolinggo telah membangun aplikasi SIMPUSTRONIK Puskesmas untuk merekam pelayanan di puskesmas, SISKIA untuk pencatatan kesehatan ibu hamil, bersalin dan nifas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani, SIDEKA Pro untuk pelaporan data kesehatan dari klinik dan rumah sakit, dan SIP untuk pelaporan capaian data kesehatan untuk di luar gedung

kesehatan (UKM). Sistem informasi di lingkungan Dinas Kesehatan ini juga telah menggunakan data interoperabilitas dengan data kependudukan (SIAK). Puskesmas di Kota Probolinggo berjumlah 6 dengan layanan unggulan masing-masing yakni:

- Puskesmas Sukabumi dengan layanan kesehatan mata (operasi katarak)
- Puskesmas Ketapang dengan layanan UGD, yang beroperasi selama 24 jam karena terletak di jalan nasional
- Puskesmas Kanigaran dengan layanan kesehatan gigi
- Puskesmas Jati dengan layanan akupunktur dan bekam
- Puskesmas Kedopok dengan layanan santun lansia
- Puskesmas Wonoasih dengan layanan Ibu hamil dan bersalin

c. Menjamin ketersediaan sarana transportasi (*Mobility*)

- 1) Digital transportation atau transportasi online mulai masuk di wilayah Kota Probolinggo seperti go-jek dan grab. Keberadaan go-jek atau grab pada dasarnya mampu mendorong terciptanya smart living melalui penyediaan transportasi yang transparan dan relatif lebih cepat. Masyarakat juga merespon positif adanya transportasi online ini. Namun, keberadaannya belum sepenuhnya dapat diterima atau berdampingan dengan transportasi konvensional lain yang telah lama dan lebih dulu ada seperti angkutan perkotaan (angkota) dan becak. Transportasi online dimungkinkan masih dapat beroperasi sepanjang tidak melakukan jasa pengantaran orang, namun lebih kepada pengantaran makanan, minuman dll.
- 2) Pemerintah Kota Probolinggo giat melakukan pengaspalan kembali di jalan-jalan protokol dalam kota sehingga kualitas prasarana jalan mengalami peningkatan yang lebih baik
- 3) Pemerintah Kota Probolinggo juga melakukan pengaspalan *hotmix* di jalan-jalan lingkungan sehingga kualitas jalan lingkungan relatif lebih baik.
- 4) Jalur transportasi angkutan perkotaan (angkota) perlu dilakukan penataan kembali mengingat kondisi sebaran pemukiman telah mengalami perkembangan yang pesat. Banyak daerah atau kawasan-kawasan permukiman yang baru tumbuh yang belum dilewati jalur transportasi perkotaan.
- 5) Pemberian subsidi kepada angkutan perkotaan (angkota) untuk menjadi armada angkutan anak sekolah. Dengan demikian, anak sekolah tidak mengalami kesulitan untuk mengakses transportasi dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar.

- 6) Pembangunan pedestrian yang representatif dan juga fungsional bagi kaum diffabel.
- 7) Pemasangan *Intelligent Traffic Light Management* dan alat-alat pemantau CCTV pada *traffic light*.
- 8) Kantong-kantong parkir
- 9) Pengembangan e-parking

Berdasarkan analisis SWOT maka diperlukan strategi yang progresif guna mewujudkan smart living.

a. Strength (S)

- Kebijakan perencanaan pembangunan yang mendukung perwujudan smart living.
- Kinerja infrastruktur yang baik (di atas rata-rata) untuk: jaringan jalan, air bersih, komunikasi dan informasi, fasilitas publik.
- Ketersediaan RTRW sebagai instrumen perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Komitmen dalam upaya mewujudkan green city dan livable city.

b. Weakness (W)

- Morfologi Kota Probolinggo tersebut belum kompak dan dapat menyebabkan urban sprawl.
- Kinerja infrastruktur yang belum baik (di bawah rata-rata) untuk: angkutan umum, air limbah, irigasi dan drainase, IMB.
- Masih terdapat permukiman kumuh seluas 193,56 Ha.
- Banyaknya kendaraan pengguna jalan dan tonase kendaraan bermotor angkut barang yang melampaui muatan sumbu terberat.
- Kurangnya partisipasi warga dalam pemenuhan sanitasi secara mandiri dan kurangnya kepedulian warga terhadap lingkungan karena kurangnya pemanfaatan sanitasi yang baik.
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya ketaatan terhadap RTRW.
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media partisipasi dalam formulasi dan pengambilan kebijakan.

c. Opportunity (O)

- Dukungan kebijakan nasional, baik perencanaan pembangunan maupun penataan ruang, dalam mewujudkan smart living.

- Dukungan trend global dalam mewujudkan smart living.
- d. Threat (T)
- Belum optimalnya kebijakan pengembangan compact city dalam perencanaan tata ruang secara nasional sebagai acuan di daerah.

#### 4.1.5 Smart Society

Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Sasaran Smart Society ini selaras dengan agenda prioritas Kota Probolinggo yakni :

**Peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan serta penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang berkeadilan**

Sasaran :

1. Pengurangan Pengangguran
2. Menciptakan masyarakat yang cerdas dan bertanggung jawab
3. Pemberian jaminan social keluarga

Target dari smart society ini adalah :

- a. Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*Community*)
  - 1) Sumber daya manusia yang ada di Kota Probolinggo memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi "*smart people*".
  - 2) Dalam hal transparansi pengelolaan anggaran, masyarakat dapat berpartisipasi dengan akses melihat nilai-nilainya berapa melalui website pemerintah [probolinggokota.go.id](http://probolinggokota.go.id)
  - 3) Penggunaan fasilitas publik Layanan pengaduan online dapat membantu untuk pemerintah memantau keamanan masyarakat sehingga masyarakat aman dan tertib
  - 4) Mengakomodasi dan memfasilitasi kegiatan komunitas yang produktif dan bersinerg dengan visi misi Kota Probolinggo
  - 5) Memfasilitasi komunitas
- b. Membangun ekosistem belajar yang efisien (*Learning*)
  - 1) Dalam membangun ekosistem belajar yang efisien, di kota Probolinggo telah dilaksanakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online, untuk jenjang pendidikan SD, SMP



- 2) Dari persepsi teknologi, pembangunan ekosistem belajar yang cerdas mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sertainternet, Digital School
- c. Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*)
- 1) Mewujudkan individu, keluarga dan masyarakat yang memiliki ketangguhan mental, social dan spiritual
  - 2) Menciptakan ketentraman, dan ketertiban serta penegakan kesadaran hukum pada masyarakat.
  - 3) Menindak tegas pelanggar sesuai dengan aturan yang ada
  - 4) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan umumnya perda
  - 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya
  - 6) Meningkatkan intensitas sosialisasi dan simulasi kebakaran dan bencana lainnya di masyarakat
  - 7) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang tentram dan tertib serta perlindungan masyarakat
  - 8) Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat
  - 9) Penanggulangan PMKS
  - 10) Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar warga miskin
  - 11) Identifikasi potensi sumber kesejahteraan sosial

#### **4.1.6 Smart Environment**

- a. Mengembangkan program proteksi lingkungan(*Protection*)
- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, di dalam struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup tetap dipertahankan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan. UPT ini berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisa serta memberikan rekomendasi tentang pencemaran lingkungan. UPT laboratorium Lingkungan ini telah memiliki sertifikat terakreditasi ISO 17025. Dengan adanya sertifikatat ini maka diharapkan pengelolaan pencemaran lingkungan dapat dikelola secara efektif dan efisien sehingga tingkat pencemaran lingkungan di Kota Probolinggo dapat ditekan sampai dengan batas terendah. Secara umum, untuk kualitas udara di Kota Probolinggo relatif masih cukup baik.

- 2) Sampai dengan tahun 2018, Kota Probolinggo telah memiliki 7,2 % Ruang Terbuka Hijau. Sebagai Kota Sedang yang memiliki luas wilayah sekitar 57.000 m<sup>2</sup>, jumlah Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 7,2 persen merupakan pencapaian yang relatif kurang baik, masih belum mencapai setengah dari 20% yang diamanatkan menurut UU Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang. Ke depan, Ruang Terbuka Hijau publik akan terus ditingkatkan sampai mencapai batas ideal. Ruang terbuka hijau ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengendalian lingkungan, memberikan ruang kecukupan oksigen, ruang rekreasi publik serta ruang berinteraksi warga. Ruang Terbuka Hijau yang berkecukupan akan mendukung terlaksananya Probolinggo Smart City.
- b. Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*Waste*)
- 1) Pemerintah Kota Probolinggo saat ini tengah mengoptimalkan pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah, dan tempat pengolahan sampah terpadu 3R, untuk mengatasi permasalahan persampahan. Untuk pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola persampahan, maka sudah dibentuk Forjamansa (Forum Jaringan Manajemen Sampah), eco pesantren, Paguyuban Peduli Sampah (Papesa), Komunitas Pelestari Keanekaragaman Hayati (Komtari Kehati) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas). Pengelolaan sampah organik juga sudah mampu memproduksi kompos/pupuk.
  - 2) Untuk pengelolaan sampah plastik, maka limbah plastik dicacah/dihancurkan dan sudah tersedia pengepul untuk didaur ulang. Saat ini juga sudah dijalankan program aspal dengan menggunakan bahan sampah plastik. Setiap 4 ton sampah plastik yang sudah dicacah mampu mengcover jalan 1,3 km.
  - 3) Untuk edukasi sejak dini tentang penanganan limbah sungai, maka dilaksanakan program kegiatan Dik-Sun atau Detektif Sungai, yakni dengan memberdayakan anak-anak sekolah SD atau setingkatnya yang ditunjuk sebagai peneliti dan pemerhati lingkungan sungai.
- c. Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggungjawab (*Energy*)
- 1) Dalam rangka pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), Kota Probolinggo melalui Dinas Lingkungan Hidup mengembangkan limbah tahu bagi warga sekitar di daerah sekitar IPAL tahu. Pemanfaat dari pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah sebanyak 45 KK teraliri energi listrik.
  - 2) Untuk penerangan jalan umum (PJU), sebagian sumber energi juga telah menggunakan panel surya (solar cell). Dengan pemanfaatan energi matahari ini,

maka mendukung program pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). Pemerintah Kota Probolinggo juga menggalakkan program kegiatan hemat energi di sarana-prasarana perkantoran, dengan menggunakan alat-alat elektrik yang hemat energi.

#### 4.2 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pemerintah daerah. Pada hakikatnya membentuk visi daerah adalah menggali gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen masyarakat. Visi yang tepat bagi masa depan suatu daerah akan mampu menjadi akselerator kinerja bagi daerah tersebut.

Untuk menjabarkan Visi Misi tersebut diatas ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, dengan Visi dan Misi jangka menengah sebagai berikut:

**“Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan Yang Maju, Sejahtera dan berkeadilan”.**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Maju** : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan social masyarakat toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamaiaka perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan local, ditopang oleh ketahanan ekonomi dan social.
- Sejahtera** : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kota Probolinggo yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman, tenteram dan makmur dalam menjalani kehidupan.
- Berkeadilan** : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Kota Probolinggo

**Kota Jasa** : adalah konsep untuk mewujudkan Probolinggo sebagai kota yang akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu system tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, system transportasi dan system teknologi informasi yang memadai

Dalam rangka mencapai visi dimaksud dirumuskan misi yang berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandate yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kota Probolinggo adalah sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat Kota Probolinggo Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Membangun Perekonomian Kota Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan Berkeadilan ;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota Probolinggo Didukung Akuntabilitas Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi Publik;
4. Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan;
5. Memperkokoh Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam Bingkai Kearifan Lokal.

LAMPIRAN





